

Buku Kurikulum Pendidikan Islam

by 1 1

Submission date: 24-Jan-2025 08:57PM (UTC+0700)

Submission ID: 2570525453

File name: Kurikulum_Pendidikan_Islam.pdf (1.33M)

Word count: 28403

Character count: 196952

Kurikulum Pendidikan Islam

Akib
Dede Supendi
Saefrudin

Editor:
Dr. Sri Lestari, M.Pd. I.

Kurikulum Pendidikan Islam

©Akib

Dede Supendi

Saefrudin

Editor: Dr. Sri Lestari, M.Pd. I.

Desain Cover: Abdullah Rasyid Ridha

Tata letak isi: Adityanang Prio Laksono

Cetakan I, 2024

15,5 x 23 cm., viii + 201 hlm

ISBN: 978-623-148-203-7

SULUR PUSTAKA

(Anggota IKAPI No.169/DIY/2023)

Jl. Jogja-Solo Km.14 Candisari RT.01/22

Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

www.sulur.co.id

CV. TRIPE KONSULTAN

JOURNAL CORNER AND PUBLISHING

Jl. R. Fatah, No.50, Bakung, Sidamulya, RT.3/4,

Sidamulya, Wanareja, Cilacap

Phone: 0812-1526-3928

<https://jcopublishing.com>

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur ¹ ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul “Kurikulum Pendidikan Islam” ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan panduan komprehensif mengenai pengembangan dan implementasi kurikulum pendidikan Islam di berbagai jenjang pendidikan. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pendidik, peneliti, mahasiswa, dan praktisi pendidikan dalam memahami dan mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang relevan dan efektif.

Kurikulum pendidikan Islam adalah rencana pembelajaran yang dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu menjalankan peran mereka sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Kurikulum

ini mencakup berbagai mata pelajaran yang tidak hanya fokus pada aspek akademis tetapi juga pada pengembangan spiritual, moral, dan sosial siswa, sehingga tercipta keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Kurikulum pendidikan Islam juga menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan pembelajaran tentang Al-Qur'an, Hadis, fiqh, sejarah Islam, dan mata pelajaran lainnya yang berkaitan dengan agama. Dengan demikian, kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar tidak hanya unggul dalam bidang akademik tetapi juga mampu mengatasi tantangan moral dan etika dalam masyarakat, menjadikannya individu yang berkontribusi positif dalam komunitas mereka dan dunia secara keseluruhan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan sejawat, para ahli, dan praktisi pendidikan yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga. Semoga upaya kita bersama ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Kendari, November 2024

Penulis,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I KONSEP KURIKULUM	1
A. Pengertian Kurikulum	2
B. Fungsi Kurikulum	5
C. Dasar Kurikulum Pendidikan Islam	10
D. Prinsip-Prinsip Kurikulum Dalam Islam	13
BAB II PERAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	17
A. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam	18
B. Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam	21
C. Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Orientasi Pengelolaan	28
BAB III PERAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	33
A. Syarat Kepala Sekolah/Madrasah	34

B. Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah	38
C. Tugas dan Peran Kepala Sekolah/Madrasah Dalam Pengembangan Kurikulum	42
BAB IV LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI	47
A. Landasan Filosofis	48
B. Landasan Psikologi	49
C. Landasan Sosiologis	51
D. Landasan Organisatoris	53
BAB V KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN AL-QURAN DAN KITAB	57
A. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Al Qur'an	58
B. Model Kurikulum Berdasarkan Kitab/Pesantren.....	62
BAB VI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCA KEMERDEKAAN	67
A. Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama	68
B. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Era Orde Baru.....	71
C. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pasca Reformasi Hingga Sekarang.....	77
BAB VII KURIKULUM MADRASAH.....	81
A. Pengertian Madrasah	82
B. Madrasah Era SKB 3 Menteri	84
C. Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah/MI	86
D. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah/MTs	91
E. Kurikulum Madrasah Aliyah/MA	97

BAB VIII MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM	103
A. Model Pengembangan Kurikulum Menurut Ralph Tyler	104
B. Model Pengembangan Kurikulum Menurut Hylda Taba	107
C. Model Pengembangan Kurikulum Menurut DK Wheeler ..	113
D. Model Pengembangan Kurikulum Menurut Beauchamp...	115
BAB IX MACAM-MACAM KONSEP KURIKULUM	117
A. Kurikulum Akademik	118
B. Kurikulum Humanistik	120
C. Kurikulum Rekonstruksi Sosial.....	122
D. Kurikulum Teknologi.....	125
BAB X PENGEMBANGAN KURIKULUM	127
A. Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum	128
B. Kurikulum Berpusat Pada Bahan Ajar	133
C. Kurikulum Mengutamakan Peranan Peserta Didik.....	138
D. Kurikulum Berpusat Pada Problematika Masyarakat	141
BAB XI RAGAM KONSEP KURIKULUM PESANTREN	145
A. Pengertian Pesantren	146
B. Kurikulum Pondok Pesantren Tradisional.....	147
C. Kurikulum Pondok Pesantren Modern.....	148
¹BAB XII MODEL DESAIN KURIKULUM	151
A. Desain Kurikulum <i>Subject Academic</i>	152
B. Desain Kurikulum Kompetensi atau Teknologi	155
C. Desain Kurikulum Humanistik	156
D. Desain Kurikulum Rekontruksi Sosial	158

1	
BAB XIII EVALUASI KURIKULUM	161
A. Pengertian Evaluasi Kurikulum	162
B. Peranan Evaluasi Kurikulum	164
C. Aspek Kurikulum yang Dinilai	167
D. Model-Model Evaluasi Kurikulum	170
BAB XIV PENUTUP	179
DAFTAR PUSTAKA	185
PROFIL PENULIS	195

BAB I

KONSEP KURIKULUM

A. Pengertian Kurikulum

Secara etimologi, kata “kurikulum” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “curir” yang berarti pelari dan “curere” yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Awalnya, istilah ini digunakan dalam dunia olahraga untuk menggambarkan suatu jarak yang harus ditempuh dalam sebuah pertandingan. Dalam konteks pendidikan, kurikulum kemudian diartikan sebagai “circle of instruction,” yaitu lingkaran pengajaran yang melibatkan guru dan suasana hati. Ada juga pandangan yang menyebut kurikulum sebagai arena pertandingan di mana pelajaran bersaing untuk mencapai garis finis berupa ijazah, diploma, atau gelar kesarjanaan (Samsul Nizar, 2002).

Dalam bahasa Arab, kurikulum disebut “manhaj,” yang berarti jalan terang yang dilalui manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Kurikulum pendidikan (manhaj al-dirasah) dalam Kamus Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan (Hasan Langgulung, 1986).

Secara terminologi, banyak ahli yang mendefinisikan kurikulum. Ramayulis (2008) mengutip berbagai pendapat :

1. Crow dan Crow mendefinisikan kurikulum sebagai rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program guna memperoleh ijazah.

2. M. Arifin melihat kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses pendidikan di suatu sistem institusional.
3. Zakiah Daradjat memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.
4. Addamardasyi Sarhan dan Munir Kamil melihat kurikulum sebagai sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah, dengan tujuan membantu perkembangan menyeluruh dan perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan pendidikan.

Dengan demikian, dalam pandangan modern, kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang mencakup lebih dari sekadar bidang studi dan kegiatan belajar. Kurikulum meliputi segala aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pelaksanaannya tidak hanya terbatas di sekolah tetapi juga mencakup kegiatan di luar sekolah.

Dalam konteks kurikulum pendidikan Islam, kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik untuk membimbing peserta didiknya menuju tujuan tertinggi pendidikan Islam

melalui akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Proses pendidikan Islam bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengacu pada konseptualisasi manusia sempurna (insan kamil), yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam (Ramayulis, 2008).

Dalam perkembangannya, pengertian kurikulum tidak hanya terbatas pada program pendidikan tetapi juga dapat diartikan menurut fungsinya:

1. Kurikulum sebagai program studi: Ini adalah seperangkat mata pelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau institusi pendidikan lainnya.
2. Kurikulum sebagai konten: Ini merujuk pada data atau informasi yang terdapat dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi tambahan yang memungkinkan terjadinya proses belajar.
3. Kurikulum sebagai kegiatan berencana: Ini adalah kegiatan yang direncanakan mengenai apa yang akan diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya agar menghasilkan hasil yang baik.
4. Kurikulum sebagai hasil belajar: Ini adalah seperangkat tujuan yang komprehensif untuk mencapai hasil tertentu tanpa menentukan cara-cara spesifik untuk mencapainya, atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan.

- 1
5. Kurikulum sebagai reproduksi kultural: Ini adalah transfer dan refleksi elemen-elemen kebudayaan masyarakat agar dimiliki dan dipahami oleh generasi muda masyarakat tersebut.
6. Kurikulum sebagai pengalaman belajar: Ini merujuk pada keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah bimbingan sekolah.
7. Kurikulum sebagai produksi: Ini adalah seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya (Muhaimin dan Abdul Mujid, 1993).

B. Fungsi Kurikulum

Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi berbagai pihak. Untuk guru, kurikulum berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Untuk orang tua, kurikulum berfungsi sebagai panduan dalam membimbing anak-anak mereka belajar di rumah. Sementara itu, bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan dukungan terhadap terselenggaranya proses pendidikan di sekolah.

Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat enam fungsi kurikulum (Rudi Susilana, 2006):

1. Fungsi Penyesuaian (the adjustive or adaptive function): Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik fisik maupun sosial, yang selalu berubah dan dinamis.
2. Fungsi Integrasi (the integrating function): Kurikulum harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh dan memungkinkan siswa, sebagai bagian integral dari masyarakat, untuk memiliki kepribadian yang diperlukan untuk hidup dan berintegrasi dalam masyarakat.
3. Fungsi Diferensiasi (the differentiating function): Kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik.
4. Fungsi Persiapan (the propaedeutic function): Kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya, serta mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat jika mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan.
5. Fungsi Pemilihan (the selective function): Kurikulum harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Fungsi ini sangat terkait dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas perbedaan individual siswa berarti memberikan mereka kesempatan untuk memilih yang sesuai

dengan minat dan kemampuan mereka. Untuk mencapai kedua fungsi tersebut, kurikulum perlu dirancang secara luas dan fleksibel.

6. Fungsi Diagnostik (the diagnostic function): Kurikulum harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk memahami dan menerima kekuatan serta kelemahan mereka. Dengan pemahaman ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi kekuatan yang mereka miliki dan memperbaiki kelemahan mereka.

Muhammad Ansyar menguraikan beberapa fungsi kurikulum sebagai berikut (Ansyar, 1989):

1. Kurikulum sebagai pedoman studi: Ini merujuk pada seperangkat mata pelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau institusi pendidikan lainnya.
2. Kurikulum sebagai konten: Ini berarti data atau informasi yang terdapat dalam buku-buku kelas tanpa tambahan data atau informasi lain yang memungkinkan terjadinya proses belajar.
3. Kurikulum sebagai kegiatan terencana: Ini adalah kegiatan yang direncanakan tentang apa yang akan diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya agar berhasil.
4. Kurikulum sebagai hasil belajar: Ini adalah seperangkat tujuan yang lengkap untuk mencapai hasil tertentu tanpa menentukan cara spesifik untuk mencapainya, atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan.

- 1
5. Kurikulum sebagai reproduksi kultural: Ini adalah transfer dan refleksi elemen-elemen kebudayaan masyarakat agar dimiliki dan dipahami oleh generasi muda masyarakat tersebut.
6. Kurikulum sebagai pengalaman belajar: Ini merujuk pada keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah bimbingan sekolah.
7. Kurikulum sebagai produksi: Ini adalah tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Selain dari fungsi-fungsi yang telah disebutkan, Dakin mengemukakan fungsi kurikulum bagi berbagai pihak yang terkait langsung dengan kurikulum sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, penulis buku ajar, dan masyarakat (Dakin, 2004).

1. Fungsi kurikulum bagi para penulis: Penulis buku ajar harus mempelajari kurikulum yang berlaku sebelum membuat pokok dan subpokok bahasan. Penulis perlu melakukan analisis instruksional dan menyusun Garis-Garis Besar Program Pelajaran (GBPP) untuk mata pelajaran tertentu, kemudian memilih bahan yang relevan dari berbagai sumber seperti buku, makalah, majalah, jurnal, koran, hasil penelitian, narasumber, pengalaman pribadi, atau lingkungan. Bahan-bahan ini harus memenuhi beberapa kriteria:

- Pedagogis: Berisi hal-hal yang normatif.
 - Psikologis: Memperhatikan kondisi kejiwaan peserta didik.
 - Sesuai dengan perhatian, minat, kebutuhan, dan perkembangan jiwa anak.
 - Didaktis: Mudah diajarkan dan diorganisir.
 - Sosiologis: Tidak kontroversial dengan keadaan masyarakat sekitar.
 - Yuridis: Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan pemerintah lainnya.
2. Fungsi kurikulum bagi guru: Guru baru harus mempelajari kurikulum dan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) sebelum mulai mengajar. Guru kemudian mencari sumber bahan yang relevan atau telah ditentukan oleh Depdiknas. Kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga guru harus memahami tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh lembaga tempat mereka bekerja.
3. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah: Kepala sekolah yang baru harus mempelajari tujuan lembaga yang akan dipimpinya dan mencari kurikulum yang berlaku untuk dipelajari, terutama buku petunjuk pelaksanaan. Tugas kepala sekolah selanjutnya adalah melakukan supervisi kurikulum.

- 1
4. Fungsi kurikulum bagi masyarakat: Kurikulum harus memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

C. Dasar Kurikulum Pendidikan Islam

Dasar kurikulum pendidikan Islam melibatkan beberapa aspek fundamental yang memberikan landasan dan arah bagi pengembangan materi dan metode pendidikan. Dasar agama sangat penting, yang berarti seluruh sistem pendidikan harus didasarkan pada ajaran Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadits, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan moralitas Islam, memastikan bahwa setiap aspek kurikulum mendukung pembentukan pribadi yang berakhlak mulia dan taat beragama. Dasar agama ini tidak hanya memberi arah pada tujuan pendidikan tetapi juga membentuk konten kurikulum dan metode pengajarannya.

Dasar filosofis memberikan panduan bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis. Ini berarti bahwa kurikulum harus mengandung kebenaran dan pandangan hidup yang diyakini oleh masyarakat Islam sebagai suatu kebenaran. Dasar filosofis ini mencakup aspek ontologi (hakikat keberadaan), epistemologi (hakikat pengetahuan), dan aksiologi (nilai-nilai yang diyakini). Dengan landasan filosofis yang kuat, kurikulum pendidikan Islam dapat mengembangkan visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam pendidikan dan bagaimana cara mencapainya,

termasuk dalam pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik.

Dasar psikologi memainkan peran penting dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Ini berarti bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan ciri-ciri perkembangan psikologis peserta didik, memperhatikan tahap kematangan, bakat, serta kecakapan berpikir mereka. Memahami perbedaan individu antara peserta didik sangat penting agar kurikulum dapat memberikan pengalaman belajar yang optimal dan mendukung perkembangan personal mereka secara menyeluruh. Kurikulum yang berdasarkan prinsip psikologi akan memastikan bahwa setiap peserta didik menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.

Dasar sosial menghubungkan kurikulum pendidikan Islam dengan masyarakat dan budaya di mana peserta didik hidup. Kurikulum harus mencerminkan ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, serta mengakar pada kondisi sosial yang ada. Ini berarti bahwa kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan perubahan sosial yang terjadi, sehingga pendidikan yang diberikan dapat mempersiapkan peserta didik untuk berperan aktif dalam masyarakat. Dasar sosial ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

1

Dasar-dasar kurikulum adalah kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi, susunan, dan organisasi kurikulum. Herman H. Home mengidentifikasi tiga dasar utama untuk penyusunan kurikulum:

1. Dasar Psikologis: Digunakan untuk memahami dan memenuhi kemampuan serta kebutuhan peserta didik.
2. Dasar Sosiologis: Digunakan untuk mengetahui tuntutan sah dari masyarakat.
3. Dasar Filosofis: Digunakan untuk memahami alam semesta dan lingkungan tempat kita hidup (Muhaimin dan Abdul Mujid, 1993).

Selain itu, penyusunan kurikulum pendidikan Islam didasarkan pada beberapa dasar:

1. Dasar Agama: Sistem pendidikan harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada agama Islam (al-Qur'an, Hadits, dan sumber-sumber lainnya) dengan segala aspeknya.
2. Dasar Falsafah: Memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung nilai-nilai kebenaran yang diyakini, baik dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi.
3. Dasar Psikologi: Memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan psikis peserta

didik, tahap kematangan, bakat, kecakapan berpikir, dan perbedaan individual antara peserta didik.

4. Dasar Sosial: Menggambarkan ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, menunjukkan bahwa kurikulum harus mengakar pada masyarakat serta perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalamnya.
5. Dasar Organisatoris: Memberikan landasan dalam penyusunan dan penyajian bahan pembelajaran selama proses pembelajaran (Iskandar dan Usman, 1988).

D. Prinsip-Prinsip Kurikulum Dalam Islam

Prinsip-prinsip tersebut berbeda-beda menurut analisis para pakar dan kemudian disesuaikan dengan esensi kurikulum pendidikan Islam (Iskandar dan Usman, 1988). Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut:

1. Prinsip Berasaskan Islam: Setiap aspek kurikulum, termasuk falsafah, tujuan, isi, metode mengajar, dan hubungan dalam lembaga pendidikan, harus didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.
2. Prinsip Mengarah kepada Tujuan: Semua aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
3. Prinsip Integritas: Ada keterkaitan antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas dalam kurikulum, serta antara isi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat.

4. Prinsip Relevansi: Pendidikan harus sesuai dengan lingkungan hidup peserta didik, kehidupan masa kini dan masa depan, serta tuntutan pekerjaan.
5. Prinsip Fleksibilitas: Kurikulum harus memberikan ruang gerak dan kebebasan dalam bertindak, baik dalam pemilihan program pendidikan maupun dalam pengembangan program pengajaran.
6. Prinsip Integritas Manusia Seutuhnya: Kurikulum harus mampu menghasilkan manusia yang dapat mengintegrasikan fakultas dzikir dan pikir, serta menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat.
7. Prinsip Efisiensi: Kurikulum harus mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lainnya secara tepat dan memadai untuk memenuhi harapan.
8. Prinsip Kontinuitas dan Kemitraan: Kurikulum harus disusun secara berkelanjutan, baik secara vertikal (penjenjangan, tahapan) maupun horizontal.
9. Prinsip Individualitas: Kurikulum harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik, termasuk aspek jasmani, watak, intelegensi, bakat, serta kelebihan dan kekurangannya.
10. Prinsip Kesamaan dalam Kesempatan dan Demokratis: Kurikulum harus memberdayakan semua peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya,

termasuk bagi ¹ kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial.

11. Prinsip Kedinamisan: Kurikulum harus ¹ dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial.
12. Prinsip Keseimbangan: Kurikulum harus dapat mengembangkan potensi peserta didik secara harmonis.
13. Prinsip Efektivitas: Kurikulum harus menunjang efektivitas pendidik dalam mengajar dan peserta didik dalam belajar.

BAB II

PERAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Secara substansial, kurikulum mencakup semua kegiatan dan pengalaman yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan (Arifin, 2011). Kurikulum bukan sekadar kumpulan pengetahuan atau informasi, melainkan sebuah integrasi dari pengetahuan yang dipilih dan relevan untuk siswa serta lingkungannya (Sukmadinata, 1997).

Dalam kajian isi kurikulum, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, ¹ isi kurikulum didefinisikan sebagai bahan atau materi pembelajaran yang meliputi tidak hanya informasi faktual, tetapi juga pengetahuan, keterampilan, konsep, sikap, dan nilai. Kedua, isi dan metode dalam proses pembelajaran saling berinteraksi. Isi kurikulum menjadi berarti ketika disampaikan kepada siswa melalui metode atau pengalaman belajar yang tepat.

Hubungan antara isi dan metode sangat erat, meskipun keduanya merupakan elemen terpisah dalam kurikulum yang dapat dinilai dengan kriteria yang berbeda. Agar proses pembelajaran efektif, baik isi maupun metode harus relevan dan signifikan (Abdullah, 2011).

Masalah terkait isi atau bahan pembelajaran mencakup beberapa hal penting: pertama, pentingnya mata pelajaran yang telah diseleksi dalam bentuk mata pelajaran itu sendiri. Kedua, pentingnya proses seleksi yang mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai mata pelajaran. Ketiga, sumber

bahan ajar yang harus terus diperbarui. Keempat, penerapan kriteria rasional dalam pemilihan isi pengajaran. Kelima, pertimbangan terhadap pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebagai faktor utama dalam seleksi isi pengajaran (Abdullah, 2011).

Setiap kriteria ini diterapkan pada seluruh materi yang diajarkan, dan tidak ada kriteria yang berdiri sendiri. Kriteria-kriteria ini berfungsi sebagai panduan dalam pemilihan ¹ isi atau bahan kurikulum, meliputi:

1. **Validitas:** Isi harus autentik, mutakhir, dan memuaskan; materi yang tidak memenuhi kriteria ini harus dihapus.
2. **Signifikansi:** Materi harus memiliki dasar yang kuat dan mencakup berbagai tujuan pendidikan.
3. **Minat:** Isi perlu disesuaikan dengan minat siswa untuk meningkatkan motivasi dan efektivitas belajar. Tanpa minat, proses belajar mungkin tidak terjadi dengan baik; oleh karena itu, guru perlu memilih materi yang dapat memfasilitasi minat siswa.
4. **Kemampuan Belajar:** Materi harus dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa untuk memastikan pembelajaran yang efektif.
5. **Konsistensi dengan Realitas Sosial:** Isi harus ¹ relevan dengan kenyataan sosial agar siswa dapat memahami fenomena dan perubahan di dunia mereka dengan lebih baik.

6. Manfaat: Materi harus berguna bagi siswa baik dalam situasi saat ini maupun di masa depan, dan harus relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja.
7. Keseimbangan: Materi harus mencakup keseimbangan antara keluasan dan kedalaman.
8. Tujuan Pendidikan: Materi harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kurikulum.
9. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Materi harus relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Muhaimin, 2005)

Secara umum, isi kurikulum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Logika: Pengetahuan mengenai benar dan salah yang didasarkan pada prosedur keilmuan.
2. Etika: Pengetahuan tentang baik dan buruk, nilai, serta moral.
3. Estetika: Pengetahuan tentang indah dan jelek, yang terkait dengan nilai seni (Arifin, 2011).

Dalam pengembangan kurikulum, isi harus disusun berdasarkan topik atau bahan kajian yang dapat dipelajari siswa selama proses pembelajaran dan harus berorientasi pada standar kompetensi lulusan, kompetensi mata pelajaran, serta kompetensi dasar yang telah ditetapkan (Arifin, 2011). Selain prinsip-prinsip tersebut, pengembang kurikulum juga perlu memperhatikan berbagai aspek dalam isi kurikulum, antara lain :

1. Teori: Kumpulan konsep atau definisi yang saling berhubungan.
2. Konsep: Abstraksi yang dibentuk dari organisasi definisi singkat mengenai kelompok fakta atau gejala yang perlu diamati.
3. Generalisasi: Kesimpulan umum yang ditarik dari hal-hal spesifik, berdasarkan analisis, pendapat, atau hasil penelitian.
4. Prinsip: Ide utama atau pola yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep.
5. Prosedur: Langkah-langkah berurutan dalam materi pelajaran yang harus diikuti siswa.
6. Fakta: Informasi khusus dalam materi yang dianggap penting.
7. Istilah: Kata-kata baru atau khusus yang diperkenalkan dalam materi.
8. Contoh: Ilustrasi atau tindakan yang bertujuan untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman.
9. Definisi: Penjelasan tentang makna atau pengertian suatu hal.
10. Preposisi: Pernyataan atau pendapat yang tidak memerlukan argumentasi.

B. Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Mengacu pada penjelasan Murray Print yang dikutip oleh Wina Sanjaya, dalam konteks hubungan antara guru dan

kurikulum, pengembangan kurikulum adalah tanggung jawab utama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk guru di setiap level pendidikan. Menurut Sanjaya, terdapat empat peran penting yang harus dijalankan oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pengembangan kurikulum: sebagai pelaksana (implementer), pengembang (developer), penyelaras (adapter), dan peneliti (researcher).

Sebagai pelaksana kurikulum, guru diharapkan untuk menerapkan kurikulum yang telah disusun, seperti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dirancang secara terpusat melalui Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Tugas guru dalam peran ini adalah mengaplikasikan kurikulum tersebut dalam proses pembelajaran sehari-hari di kelas, tanpa terlibat dalam penentuan isi atau target kurikulum.

Sebagai implementer, peran guru terbatas pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan, memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan lingkungan sekolah, serta memanfaatkan media pembelajaran yang tepat. Guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengembangkan strategi dan metode yang efektif, serta mengelola kelas dengan baik sesuai dengan alokasi waktu yang ada. Selain itu, mereka perlu merefleksikan proses pembelajaran, berkonsultasi dengan kepala madrasah atau pengawas untuk mengatasi masalah yang

muncul, dan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar.

Implementasi kurikulum untuk semua mata pelajaran, termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI), melibatkan beberapa aspek penting, seperti keterkaitan antara proses, tujuan, dan isi kurikulum, kejelasan teori belajar, serta hubungan dengan aspek sosial, budaya, dan teknologi. Selain itu, perlu diperhatikan ketersediaan fasilitas, alokasi waktu, fleksibilitas, serta peran guru dan siswa, di samping pentingnya evaluasi dan umpan balik.

Sebagai pengembang kurikulum, guru memiliki tanggung jawab untuk merancang kurikulum madrasah. Peran ini melibatkan penyesuaian dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah, serta kebutuhan belajar siswa. Guru terlibat dalam pembuatan dokumen kurikulum, pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), serta muatan lokal (mulok) sebagai bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunan kurikulum mulok disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah dan karakteristiknya, yang dapat menyebabkan perbedaan antara kurikulum mulok di berbagai sekolah atau madrasah.

Dalam perannya sebagai pengembang kurikulum, guru diharapkan aktif, kreatif, dan memiliki komitmen tinggi. Mereka harus mengikuti pelatihan terkait konsep dasar dan pengembangan kurikulum, berpartisipasi aktif dalam tim pengembang kurikulum sesuai dengan mata pelajaran, serta terlibat dalam penyusunan

standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL). Guru juga harus aktif dalam menyusun standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD), melakukan pemetaan, mengembangkan silabus pembelajaran, dan menyiapkan semua perangkat operasional yang mendukung RPP, seperti lembar kerja siswa dan bahan ajar, termasuk modul pembelajaran.

Sebagai penyesuai kurikulum, guru bertanggung jawab untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal, terutama yang berkaitan dengan siswa dan daerah. Tugas utama guru dalam fase ini adalah memahami karakteristik sekolah mereka, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan daerah sekitar, lalu merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

¹ Untuk memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah, guru harus mulai dengan mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan masyarakat terhadap sekolah. Ini melibatkan pengumpulan data tentang berbagai aspek lokal dari pihak terkait ¹ seperti masyarakat sekitar, pemerintah daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, serta potensi daerah yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sumber daya alam. Data ini dapat diperoleh dari rencana pembangunan daerah, pengembangan ketenagakerjaan, aspirasi masyarakat terkait pelestarian alam, dan kebutuhan lokal.

Berdasarkan analisis data tersebut, berbagai jenis kebutuhan dapat diidentifikasi, yang kemudian digunakan untuk

menentukan muatan kurikulum lembaga. Beberapa fungsi muatan kurikulum yang mungkin meliputi pelestarian kajian kitab kuning, peningkatan praktik salafiyah, dan pengembangan keterampilan berwirausaha. Penentuan muatan lokal didasarkan pada kriteria seperti kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, kemampuan guru, ketersediaan sarana dan prasarana, serta aspek sosial dan keamanan.

Akhirnya, penentuan bahan ajar lokal harus memperhatikan kriteria seperti kesesuaian dengan perkembangan siswa, kemampuan dan ketersediaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana yang ada, serta dampak sosial dan keamanan. Selain itu, harus dipastikan bahwa materi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan madrasah dan masyarakat, dan dapat mendukung pengembangan standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), serta silabus.

Sebagai peneliti kurikulum, guru berperan sebagai *curriculum researcher* yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja profesional mereka. Dalam peran ini, guru memiliki tugas untuk menilai berbagai komponen kurikulum, seperti bahan ajar, efektivitas program, dan strategi atau model pembelajaran, serta mengumpulkan data mengenai pencapaian siswa terhadap target kurikulum.

Untuk melaksanakan penelitian kurikulum, guru dapat menggunakan metode seperti Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan *lesson study*. PTK adalah metode penelitian yang berfokus

pada masalah yang dihadapi guru dalam penerapan kurikulum. Melalui PTK, guru tidak hanya melakukan penelitian tetapi juga mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan. Sementara itu, *lesson study* melibatkan satu atau beberapa guru yang bekerja sama dalam merancang kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini meliputi perencanaan bersama, pelaksanaan oleh salah satu guru, observasi oleh rekan guru, dan refleksi bersama atas hasil observasi tersebut.

Di Indonesia, perubahan kurikulum seringkali dianggap sebagai hasil pergantian menteri pendidikan, padahal perubahan ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan zaman. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi, dengan koordinasi dan supervisi dari dinas pendidikan setempat. Otonomi sekolah mendorong guru untuk beralih dari peran sebagai pengguna kurikulum menjadi pengembang kurikulum, bertransformasi dari kultur kerja konvensional ke kultur kerja kontemporer yang lebih dinamis, dan menjadi agen perubahan yang menyesuaikan pengajaran dengan perkembangan zaman.

Pada era globalisasi, madrasah perlu melibatkan guru dalam reformasi dan inovasi proses belajar mengajar dan kurikulum secara berkelanjutan. Untuk mendukung reformasi dan inovasi pendidikan, diperlukan data empirik yang diperoleh melalui kegiatan penelitian.

Tanpa dukungan penelitian, guru dapat terisolasi dari pengetahuan dan informasi terbaru, menyebabkan stagnasi dalam proses pendidikan serta menghambat reformasi dan inovasi. Penelitian memberikan dasar yang solid bagi guru untuk membuat keputusan yang tepat dan akurat dalam proses pembelajaran dan perbaikan kurikulum. Dengan adanya data dari penelitian, pembelajaran dan kurikulum dapat dicapai dengan lebih efektif dan optimal.

Pembelajaran yang efektif merupakan hal yang kompleks dan sulit untuk dikonseptualisasikan secara tunggal dan universal. Setiap siswa adalah individu unik dengan minat, bakat, motivasi, dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Perbedaan ini membuat sulit untuk merumuskan proses pembelajaran dan kurikulum yang ideal. Tanpa dukungan penelitian, guru mungkin terjebak dalam praktik pembelajaran yang tidak efektif dan dapat membatasi kreativitas siswa, menggunakan metode yang sama dari tahun ke tahun, meskipun kondisi siswa dan tuntutan zaman telah berubah.

Perubahan zaman yang cepat memengaruhi sikap dan reaksi siswa terhadap berbagai tuntutan. Oleh karena itu, penting bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk terus-menerus berperan sebagai peneliti kurikulum yang dapat memahami dan beradaptasi dengan kondisi zaman yang berkembang.

C. Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Orientasi Pengelolaan

Dalam konteks manajerial, pengembangan kurikulum dapat dibagi menjadi dua pendekatan: sentralisasi dan desentralisasi (Sukmadinata, 1997). Untuk menyeimbangkan kedua pendekatan ini, penting untuk membahas peran **guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral**. Dalam memahami perbedaan **antara kurikulum sentral dan desentral**, perlu diingat **bahwa** berbagai kebijakan pemerintah telah mengatur hal tersebut, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini menetapkan berbagai standar, termasuk Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Menurut Nana S. Sukmadinata, dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi, guru tidak terlibat dalam perancangan dan evaluasi kurikulum makro, yang dilakukan oleh tim atau komisi khusus yang terdiri dari para ahli. Guru hanya bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum di bidangnya untuk periode tertentu, seperti satu tahun, satu semester, satu catur wulan, atau beberapa minggu, yang dikenal sebagai satuan pelajaran. Ini termasuk menyusun program tahunan, semesteran, dan satuan pelajaran, serta menentukan metode, media pembelajaran, dan evaluasi.

Dengan penjelasan tersebut, jelas bahwa tugas guru mencakup penetapan ¹ tujuan yang tepat, pemilihan dan penyusunan tahapan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, penggunaan metode dan media yang bervariasi, serta pembuatan program dan alat evaluasi yang sesuai. Kurikulum yang tersusun secara sistematis akan mempermudah pelaksanaannya.

Implementasi kurikulum sangat bergantung pada kreativitas, keahlian, dedikasi, dan ketekunan guru (Sukmadinata, 1997). Dalam konteks pengembangan kurikulum desentralisasi, kurikulum dikembangkan oleh sekolah atau kelompok sekolah di suatu daerah, yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah, dan kapasitas sekolah-sekolah tersebut.

Kurikulum desentralisasi memiliki beberapa keuntungan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain:

1. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat,
2. Sesuai dengan kemampuan sekolah dari segi profesional, finansial, dan manajerial,
3. Disusun oleh guru-guru sendiri, sehingga memudahkan pelaksanaannya.
4. Dapat memotivasi sekolah, termasuk kepala sekolah dan guru, untuk mengembangkan dan menciptakan kurikulum yang lebih baik, mendorong kompetisi dalam pengembangan kurikulum.

Namun, kelemahannya meliputi:

1. Kurangnya keseragaman yang diperlukan untuk persatuan nasional,
2. Tidak adanya standar penilaian yang seragam,
3. Kesulitan dalam mutasi siswa antar sekolah,
4. Tantangan dalam pengelolaan dan penilaian secara nasional
5. Belum semua sekolah siap untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum mereka sendiri.

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan pendekatan yang menggabungkan aspek sentralisasi dan desentralisasi. Dalam model campuran ini, ¹ peran guru dalam pengembangan kurikulum menjadi lebih besar dibandingkan dengan sistem yang sepenuhnya terpusat. Guru-guru tidak hanya terlibat dalam menerjemahkan kurikulum induk ke dalam program tahunan atau rencana pembelajaran, tetapi juga dalam menyusun kurikulum menyeluruh untuk sekolah mereka. Mereka berkontribusi dalam merumuskan setiap komponen dan elemen kurikulum, sehingga ¹ merasa memiliki kurikulum dan termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengembangan kurikulum.

Oleh karena itu, guru harus dilibatkan sejak tahap awal penyusunan kurikulum, sehingga mereka benar-benar memahami dan menguasai kurikulum tersebut. Dengan cara ini, pelaksanaan kurikulum di kelas dapat berjalan dengan lebih

tepat dan lancar. Guru tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga sebagai perencana, pemikir, penyusun, pengembang, pelaksana, dan evaluator kurikulum.

Dalam konteks pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), guru diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai Ilahiyyah yang sesuai dengan prinsip religiusitas Islam dalam diri siswa. Nilai Ilahiyyah ini berhubungan dengan konsep ke-Tuhanan dan segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan, termasuk nilai keimanan, 'ubudiyah, dan mu'amalah. Guru perlu berusaha keras untuk mengembangkan nilai-nilai ini dalam diri siswa.

Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai Ilahiyyah akan semakin efektif jika didukung oleh perubahan, penghayatan, dan penerapan strategi yang sesuai dengan perkembangan jiwa siswa. Dengan demikian, guru PAI harus melakukan berbagai upaya adaptif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan kurikulum PAI untuk mencapai hasil yang optimal.

¹ BAB III

PERAN KEPALA SEKOLAH/ MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Syarat Kepala Sekolah/Madrasah

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, Kepala Sekolah adalah seorang guru yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola berbagai jenis satuan pendidikan, seperti taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), serta Sekolah Indonesia di Luar Negeri (Permendikbud, 2018).

Seorang Guru dapat menjadi calon Kepala Sekolah jika memenuhi kriteria berikut (Permendikbud, 2018):

1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B;
2. Memiliki sertifikat pendidik;
3. Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, harus memiliki pangkat minimal Penata, golongan ruang III/c;
4. Memiliki pengalaman mengajar minimal 6 tahun sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah, atau 3 tahun jika di TK/TKLB;
5. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru yang disebut paling rendah "Baik" selama 2 tahun terakhir;

6. Memiliki pengalaman manajerial¹ relevan dengan fungsi sekolah minimal 2 tahun;
7. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
8. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Tidak sedang menjadi tersangka atau pernah menjadi terpidana;
10. Berusia maksimal 56 tahun pada saat pertama kali diangkat sebagai Kepala Sekolah.

Persyaratan di atas menunjukkan bahwa seorang Kepala Sekolah harus memiliki pengalaman¹ mengajar di sekolah minimal 6 tahun dan pengalaman manajerial atau pengelolaan sekolah selama minimal 2 tahun. Pengalaman tersebut mencerminkan pemahaman mendalam tentang pengelolaan pembelajaran di kelas dan kelembagaan, yang akan sangat berharga ketika menjabat sebagai Kepala Sekolah untuk mendorong inovasi dan perbaikan dalam pembelajaran serta pengelolaan sekolah.

Pembelajaran merupakan fokus¹ utama, karena inti dari kegiatan pendidikan adalah memastikan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi sekolah. Oleh karena itu, Kepala Sekolah harus memiliki pandangan visioner dalam mengembangkan sekolah yang dipimpinnya.¹ Kurikulum yang dirancang dan diterapkan di sekolah

juga menjadi perhatian penting bagi Kepala Sekolah. Penting bagi Kepala Sekolah untuk mencermati kurikulum yang ada agar dapat memudahkan guru dalam pelaksanaannya, bukan malah menambah kesulitan.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh calon Kepala Sekolah meliputi berbagai dimensi, seperti kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial (Permendikbud, 2018). Kompetensi-kompetensi tersebut mencerminkan bahwa Kepala Sekolah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat menjalankan tugas dengan lancar dan tepat sasaran. Berikut adalah rincian kompetensi yang diperlukan:

1. **Pengetahuan: Kepala Sekolah** harus **memiliki** pengetahuan yang luas dan mendalam agar dapat memberikan solusi terhadap masalah keilmuan di **bidangnya**.
2. **Sikap dan Keterampilan pada Dimensi Kompetensi Kepribadian:** Kepala Sekolah harus menjadi teladan dengan menunjukkan sikap dan keterampilan pribadi yang baik.
3. **Sikap dan Keterampilan pada Dimensi Kompetensi Manajerial:** Kepala Sekolah harus **menguasai** teknik-teknik **pengelolaan sekolah** yang efektif.
4. **Sikap dan Keterampilan pada Dimensi Kompetensi Supervisi:** Kepala Sekolah harus mampu **memberikan arahan** dan **bimbingan dengan teliti dan penuh perhatian**.

5. Sikap dan Keterampilan pada Dimensi Kompetensi Sosial: Kepala Sekolah diharapkan dapat menunjukkan sikap sosial yang baik dan menjadi pengayom bagi seluruh warga sekolah.

Menurut Ade Cahyana, kompetensi yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah meliputi beberapa aspek penting yang diadaptasi dari Council of Chief State School Officers (CCSSO, 2002) (Cahyana, 2008), sebagai berikut:

1. Menyediakan dan Mengomunikasikan Visi Pembelajaran: Kepala Sekolah harus memfasilitasi pengembangan, penyebaran, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang jelas, didukung oleh komunitas sekolah, dan dikomunikasikan dengan efektif.
2. Menciptakan Lingkungan yang Mendukung: Kepala Sekolah harus membantu dan membina lingkungan sekolah serta program pengajaran yang mendukung proses belajar siswa dan pertumbuhan profesional guru serta karyawan.
3. Mengelola Organisasi dan Sumber Daya: Kepala Sekolah bertanggungjawab untuk memastikan manajemen organisasi dan pemanfaatan sumber daya sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif.
4. Berkoordinasi dengan Wali Murid dan Komunitas: Kepala Sekolah harus bekerja sama dengan wali murid dan anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, serta memobilisasi sumber daya masyarakat.

5. Menjadi Teladan: Kepala Sekolah harus memberikan contoh tindakan yang baik.
6. Memahami dan Memengaruhi Lingkungan Luas: Kepala Sekolah harus memahami, merespons, dan memengaruhi lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas.

B. Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah

Kinerja kepala sekolah atau madrasah mencakup berbagai aspek penting yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan institusi pendidikan. Pertama, kinerja manajerial adalah salah satu komponen utama. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola semua aspek operasional sekolah, mulai dari menyusun rencana strategis hingga melaksanakan evaluasi dan pelaporan. Tugas ini mencakup pengelolaan anggaran, fasilitas, serta memastikan bahwa semua kegiatan sekolah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Supervisi merupakan bagian penting dari kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya. Ini melibatkan perencanaan program, melaksanakan supervisi di kelas, dan memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Melalui supervisi yang baik, kepala sekolah dapat memastikan bahwa standar pendidikan

terjaga dan membantu pengembangan profesional guru serta karyawan.

Pengembangan kewirausahaan juga menjadi bagian dari kinerja kepala sekolah. Ini melibatkan penciptaan dan penerapan strategi untuk meningkatkan kemandirian sekolah, seperti meluncurkan kegiatan kewirausahaan dan mengelola inovasi. Kepala sekolah perlu berperan dalam mengidentifikasi peluang baru untuk pendanaan dan pengembangan, serta memastikan bahwa kegiatan kewirausahaan dapat mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sekolah.

Kinerja kepala sekolah diukur berdasarkan hasil yang dicapai dalam tugas-tugas tersebut. Penilaian prestasi kerja kepala sekolah mencakup hasil pelaksanaan manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kinerja juga dinilai dari tugas tambahan di luar tugas pokok, yang mencerminkan kemampuan kepala sekolah dalam menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan. Keberhasilan dalam berbagai aspek ini menunjukkan seberapa efektif kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola institusi pendidikan.

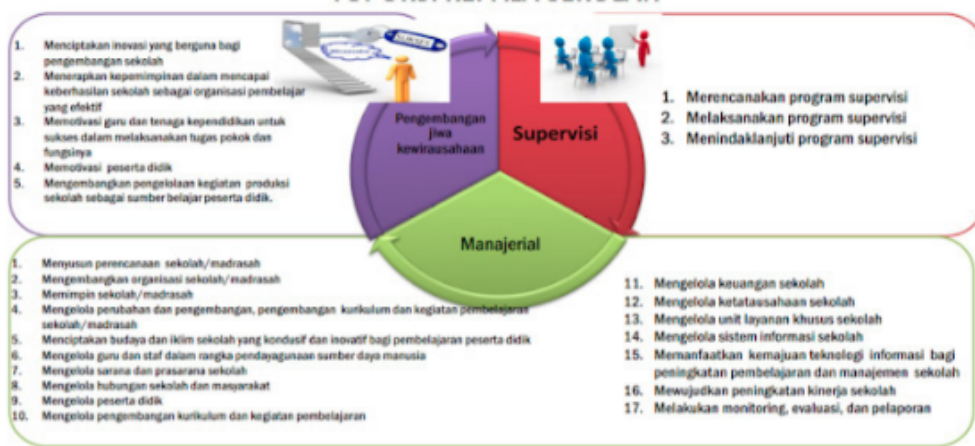
Kinerja kepala sekolah umumnya mencakup tiga aspek utama, sesuai dengan ¹Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 pada pasal 15 (1), yang menyebutkan bahwa “Tugas kepala sekolah mencakup pelaksanaan manajerial, pengembangan

kewirausahaan, dan supervisi terhadap guru serta tenaga kependidikan” (Permendikbud, 2018).

Penilaian kinerja kepala sekolah dapat dikategorikan sebagai prestasi atau tidak, berdasarkan indikator penilaian prestasi kerja yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya. Komponen penilaian tersebut mencakup:

1. Pelaksanaan Tugas Manajerial: Evaluasi hasil dari pelaksanaan tugas-tugas manajerial.
2. Pengembangan Kewirausahaan: Penilaian terhadap hasil dari upaya pengembangan kewirausahaan.
3. Supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan: Penilaian hasil dari pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
4. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan: Evaluasi hasil dari pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
5. Tugas Tambahan: Penilaian terhadap tugas-tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1).

Secara umum, kinerja seorang kepala sekolah dapat dilihat dari aspek-aspek tersebut, seperti yang diuraikan dalam bagan oleh Ainul Mulyana (Mulyana, 2019).



Tupoksi Kepala Sekolah Sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018

Gambar 1. Kinerja Kepala Sekolah

Gambar di atas menunjukkan bahwa tugas kepala sekolah dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. **Manajerial:** Ini mencakup berbagai tanggung jawab kepala sekolah terkait dengan manajemen, mulai dari merencanakan sekolah, melakukan pemantauan, hingga evaluasi dan pelaporan.
- 1 **2. Supervisi:** Berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru dan karyawan, termasuk perencanaan program, pelaksanaan, dan tindak lanjut dari supervisi.
- 1 **3. Pengembangan Jiwa Kewirausahaan:** Merupakan strategi untuk mencapai kemandirian sekolah melalui kegiatan kewirausahaan, yang meliputi penciptaan inovasi, pengembangan sekolah, serta pengelolaan kegiatan produksi.

1

C. Tugas dan Peran Kepala Sekolah/Madrasah Dalam Pengembangan Kurikulum

Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah memegang peran kunci dalam pengembangan kurikulum dengan bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Tugas utama mereka melibatkan koordinasi dengan pengembang kurikulum, guru, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kurikulum yang diterapkan memenuhi standar pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Kepala sekolah juga berperan dalam mengarahkan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru agar mereka mampu mengimplementasikan kurikulum dengan efektif, serta dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran.

Kepala sekolah atau madrasah harus berperan aktif dalam melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang diterapkan. Ini mencakup mengumpulkan umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua, serta menganalisis hasil pembelajaran untuk memastikan kurikulum berfungsi dengan baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Mereka juga harus mampu menyesuaikan kurikulum dengan perubahan kebijakan pendidikan dan kebutuhan masyarakat, serta mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Dengan demikian, kepala sekolah atau madrasah berkontribusi besar dalam memastikan kurikulum yang berkualitas dan relevan bagi perkembangan pendidikan di lembaga mereka.

Kepala sekolah memiliki enam tugas pokok dan fungsi, yakni:

1. Sebagai pendidik (educator);
2. Manajer (manager);
3. Pengelola administrasi (administrator);
4. Penyelia (supervisor);
5. Pemimpin (leader); dan
6. Pembaharu (innovator) (Muhadzdibah, 2017).

Tugas-tugas ini menunjukkan bahwa posisi kepala sekolah tidaklah mudah, karena memerlukan ¹berbagai kompetensi dan pemikiran visioner untuk pengembangan lembaga pendidikan yang dipimpinnya.

Dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum, peran kepala sekolah sangat strategis dan terbagi dalam dua area utama (Juahab, 2019).

- ¹1. Kepala sekolah berfungsi sebagai manajer.

Menurut Vincent Gaspersz (2003), tugas manajer mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, koordinasi, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai kepala sekolah, kemampuan dalam melaksanakan fungsi manajemen ini—termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (POAC)—adalah kunci. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memiliki pemahaman mendalam tentang pengembangan kurikulum sebagai langkah awal yang penting.

Kepala sekolah juga harus mampu mengaitkan arah pengembangan kurikulum dengan visi dan misi sekolah. Pencapaian target sekolah memerlukan lebih dari sekadar niat, melainkan juga kemampuan analisis yang mendalam terhadap kesesuaian dan kebutuhan sekolah. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), yang membantu mengevaluasi posisi lembaga pendidikan serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum di masa depan.

1 2. Kepala Sekolah sebagai Pemimpin

Dalam teori kepemimpinan, terdapat dua gaya utama yang dikenal, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Kepala sekolah harus mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin dengan efektif, memberikan arahan dan pengawasan kepada para guru di lembaga yang dipimpinnya. Penting bagi kepala sekolah untuk memastikan bahwa beban tugas yang diberikan kepada guru tidak melebihi kapasitas mereka, terutama dalam hal pengembangan kurikulum.

Seringkali, guru mengalami kelebihan beban tugas, seperti diminta untuk mengunjungi siswa bermasalah di rumah, yang dapat membebani kinerja mereka. Kepala sekolah harus membagi tugas secara adil, misalnya dengan melibatkan guru bimbingan konseling atau guru piket lainnya, agar tugas

dapat dikelola dengan lebih baik. Keberhasilan kepala sekolah dalam memimpin sangat dipengaruhi oleh kepribadian yang matang dan kemampuannya dalam memberikan arahan yang jelas agar para guru dapat melaksanakan tugas dengan efektif.

Menurut Ordway Tead, kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki beberapa sifat penting (Juahab, 2019), antara lain: kesadaran akan tujuan dan arah, antusiasme, keramahan dan kecintaan, integritas, penguasaan teknis, ketegasan dalam pengambilan keputusan, kecerdasan, keterampilan mengajar, dan kepercayaan. Sifat-sifat ini merupakan modal penting untuk memastikan kelancaran tugas dan peran kepala sekolah sebagai pemimpin.

Dengan demikian, tugas kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum tidaklah mudah. Kepala sekolah harus mampu mempraktikkan perannya baik sebagai manajer maupun pemimpin, menggerakkan seluruh sumber daya manusia dan potensi yang dimiliki oleh sekolah atau madrasah yang dipimpinnya.

BAB IV

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI

A. Landasan Filosofis

Filsafat memiliki peranan penting dalam pendidikan, terutama dalam menetapkan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat memberikan panduan tentang ke mana peserta didik akan diarahkan, dan untuk itu, penting ada kejelasan mengenai pandangan hidup manusia atau eksistensi. Pandangan hidup atau filsafat yang dianut oleh suatu bangsa, kelompok masyarakat, atau individu sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan sendiri adalah rumusan komprehensif tentang pencapaian yang diharapkan dari peserta didik sesuai dengan sistem nilai dan filsafat yang dianut.

Oleh karena itu, tujuan pendidikan di setiap negara akan berbeda-beda, mencerminkan perbedaan filsafat yang dianut. Pengembangan kurikulum memerlukan filsafat sebagai dasar berpikir. Kajian filsafat kurikulum bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti: bagaimana tujuan pendidikan seharusnya dirumuskan, materi pendidikan apa yang harus disajikan kepada siswa, metode pendidikan yang sesuai, dan peran apa yang seharusnya dimainkan oleh pendidik dan peserta didik.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sangat tergantung pada landasan filsafat yang digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum. Landasan filsafat ini mencakup konsep-konsep seperti metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi, yang pada gilirannya mempengaruhi rumusan tujuan

pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, serta peran pendidik dan peserta didik.

B. Landasan Psikologi

Pendidikan selalu berhubungan dengan perilaku manusia. Setiap proses pendidikan melibatkan interaksi antara peserta didik dan lingkungannya, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Melalui pendidikan, diharapkan terjadi perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan dalam berbagai aspek, seperti fisik, mental, emosional, moral, intelektual, dan sosial. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun pendidikan dan pengajaran adalah sarana untuk mengubah perilaku manusia, perubahan perilaku peserta didik tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi program pendidikan saja. Faktor kematangan pribadi dan pengaruh dari luar program pendidikan atau lingkungan juga memainkan peran.

Kurikulum, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, berhubungan erat dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Kurikulum diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan aktual dan meningkatkan kemampuan baru mereka dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Terdapat dua bidang psikologi utama yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu:

1. Psikologi Perkembangan

Psikologi perkembangan mempelajari perilaku individu anak didik seiring dengan pertumbuhannya. Ilmu ini, yang juga dikenal sebagai ilmu jiwa perkembangan, mencakup kajian mengenai hakikat perkembangan, tahapan-tahapan perkembangan anak, aspek-aspek perkembangan, serta tugas-tugas perkembangan individu. Semua informasi ini menjadi dasar penting dalam pengembangan kurikulum. Psikologi perkembangan membantu menentukan bobot pembelajaran pada berbagai tingkat dan jenjang, serta menyesuaikan beban belajar dengan tahap perkembangan psikologi dan kejiwaan peserta didik.

2. Psikologi Belajar

Psikologi belajar fokus pada perilaku individu dalam konteks pembelajaran. Bidang ini mengkaji hakikat belajar, teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu yang terkait dengan proses belajar. Psikologi belajar memberikan landasan teoritis untuk perkembangan kurikulum dengan memeriksa bagaimana individu belajar dan melakukan pembelajaran. Istilah “change” dalam konteks ini merujuk pada perubahan yang dialami seseorang setelah proses belajar, yang mencakup perubahan dalam kebiasaan, keterampilan, serta aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor).

1

C. Landasan Sosiologis

Kurikulum dapat dianggap sebagai desain pendidikan yang menentukan pelaksanaan dan hasil dari proses pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan masyarakat. Pendidikan tidak hanya sebatas teori, tetapi juga harus memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk hidup, bekerja, dan berkembang dalam masyarakat.

Peserta didik berasal dari masyarakat dan menerima pendidikan, baik formal maupun informal, dalam konteks lingkungan sosial mereka. Pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kekayaan budaya masyarakat, serta dapat membantu peserta didik lebih memahami dan berkontribusi pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan, isi, dan proses pendidikan harus diselaraskan dengan kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat setempat.

Masyarakat memiliki sistem sosial dan budaya yang mengatur pola kehidupan dan hubungan antar anggotanya. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat dua pertimbangan sosial budaya penting: pertama, mengatasi tantangan bagi anggota masyarakat yang belum sepenuhnya dewasa dalam kebudayaan; kedua, memastikan kurikulum mencerminkan cara berpikir, merasa, bercita-cita, dan kebiasaan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memungkinkan manusia untuk memahami

peradaban masa lalu, berpartisipasi dalam peradaban saat ini, dan berkontribusi pada peradaban masa depan. Penerapan teori, prinsip, hukum, dan konsep-konsep dari berbagai ilmu pengetahuan ¹ dalam kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal, agar hasil belajar siswa menjadi lebih relevan dan berarti dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sesuai dengan dasar pengembangan kurikulum yang ada.

1. Tujuh fungsi sosial pendidikan meliputi:
2. Mengembangkan keterampilan
3. Mentransmisikan budaya
4. Mendorong adaptasi terhadap lingkungan
5. Membentuk disiplin
6. Mendorong kerja sama kelompok
7. Meningkatkan perilaku etis
8. Memilih bakat dan menghargai prestasi

Kebudayaan memainkan peran penting dalam pengembangan kurikulum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Individu tidak secara otomatis lahir dengan budaya; kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, dan keterampilan diperoleh ¹ melalui interaksi dengan lingkungan budaya,

keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, sekolah memiliki tugas khusus dalam memberikan pengalaman budaya kepada peserta didik melalui kurikulum.

- 1
2. Kurikulum harus mencakup aspek sosial dan budaya. Aspek sosiologis terkait dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam, seperti masyarakat industri, pertanian, atau nelayan. Pendidikan di sekolah bertujuan untuk membantu anggota masyarakat hidup dan berinteraksi dengan orang lain serta meningkatkan kualitas hidup mereka sebagai makhluk berbudaya. Dengan demikian, kurikulum harus mencerminkan kebudayaan umum yang meliputi nilai-nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

1 D. Landasan Organisatoris

Landasan ini didasarkan pada teori psikologi asosiasi, yang melihat keseluruhan sebagai gabungan dari bagian-bagiannya, sehingga kurikulum dipandang sebagai kumpulan mata pelajaran terpisah. Sebaliknya, teori psikologi Gestalt menganggap bahwa keseluruhan memengaruhi cara kurikulum diorganisasi, yang disusun secara unit tanpa batasan antar mata pelajaran. Dalam pengembangan kurikulum, dua pola organisasi penting yang perlu diperhatikan adalah organisasi horizontal dan vertikal.

Organisasi horizontal berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dilakukan pada waktu yang bersamaan, seperti dalam satu hari, satu minggu, atau satu semester. Pola ini memastikan bahwa pengalaman belajar yang disajikan

saling mendukung dan tidak memberatkan siswa. Dalam mengelola pengalaman belajar secara horizontal, penting untuk mempertimbangkan ¹ beban belajar yang harus ditanggung siswa dalam periode waktu tersebut, serta variasi dan kombinasi jenis pengalaman belajar. Ini berarti memperhatikan seberapa banyak pengalaman belajar yang dapat dipahami siswa dalam waktu tertentu, biasanya diukur ¹ dengan SKS atau jumlah mata pelajaran.

Sementara itu, organisasi vertikal mengatur pengalaman belajar berdasarkan waktu atau jenjang pendidikan. Pola ini harus mempertimbangkan bagaimana ¹ pengalaman belajar pada semester satu berhubungan dengan semester dua, serta bagaimana pengalaman belajar untuk kelas yang berbeda, seperti kelas 1 berbanding dengan kelas 2, 3, dan seterusnya, atau pengalaman belajar di SD dibandingkan dengan SMP dan ¹ SMA. Dengan kata lain, organisasi vertikal berfokus pada urutan penyajian pengalaman belajar yang harus dipelajari siswa.

Berikut adalah beberapa jenis desain kurikulum yang umum digunakan:

- ¹ 1. Desain Kurikulum Berpusat pada Mata Pelajaran (The Subject-Centered Curriculum) Desain kurikulum ini fokus pada mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Kurikulum ini terdiri dari kumpulan mata pelajaran yang harus dipelajari siswa selama periode tertentu sesuai jenjang pendidikan mereka. Biasanya, desain ini tidak memiliki tujuan eksplisit

yang mengharuskan siswa menguasai kompetensi tertentu. Tujuan kurikulum bersifat implisit, yaitu menuntut siswa untuk mempelajari dan menguasai materi pelajaran yang telah tersusun dalam sejumlah mata pelajaran.

1
2. **Desain Kurikulum Bidang Studi (Broad-fields Curriculum)**

Desain ini mengelompokkan beberapa mata pelajaran dengan fokus kajian yang serupa menjadi satu bidang studi. Misalnya, mata pelajaran sejarah, ekonomi, sosiologi, dan antropologi, yang mempelajari masalah sosial, digabungkan dalam satu bidang studi ilmu sosial. Demikian juga, mata pelajaran seperti biologi, fisika, kimia, serta bumi dan antariksa, yang membahas masalah alam, digolongkan ke dalam bidang studi ilmu pengetahuan alam. Dalam kurikulum SD, ini dikenal sebagai Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

1
3. **Desain Kurikulum Terpadu (Integrated Curriculum)** Desain

kurikulum ini menggabungkan semua mata pelajaran menjadi satu dengan menghilangkan batasan antar mata pelajaran. Materi atau pengalaman belajar yang disajikan tidak lagi merujuk pada mata pelajaran atau bidang studi tertentu, melainkan pada tema tertentu. Daftar kajian untuk siswa mencakup topik-topik yang dapat dibahas dari berbagai disiplin ilmu. Dalam kurikulum terintegrasi, tidak ada nama mata pelajaran atau bidang studi, melainkan tema-tema yang dibahas. Di Indonesia, kurikulum TK telah

menggunakan desain kurikulum terpadu sejak 1975, tanpa nama mata pelajaran, hanya ¹ tema dan sub-tema yang disusun dari yang paling dekat dengan anak hingga yang lebih jauh. Tema-tema yang dibahas di TK meliputi Diriku, Keluargaku, Lingkunganku, Binatang, Kendaraan, Tanaman, dan lainnya. Implementasinya melibatkan pembahasan tema ¹ dari berbagai sudut pandang, seperti kemampuan berbahasa, lingkungan, dan kesehatan.

BAB V

KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN AL-QURAN DAN KITAB

A. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Al Qur'an

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berbasis pada Al-Qur'an dirancang untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci tersebut. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, menawarkan pedoman komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Kurikulum PAI berbasis Al-Qur'an bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal ini diwujudkan melalui pembelajaran yang menekankan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kurikulum ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an. Siswa diajarkan cara membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar, memahami tafsirnya, serta mengenal asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat). Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya bisa membaca, tetapi juga mengerti makna dan konteks dari ayat-ayat yang mereka baca. Hal ini membantu siswa mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an secara tepat dalam berbagai situasi kehidupan. Kurikulum ini juga menggarisbawahi pentingnya penghayatan nilai-nilai Al-Qur'an. Siswa diajak untuk merenungkan dan memahami nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya, nilai kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Dengan menginternalisasi

nilai-nilai ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pengamalan ajaran Al-Qur'an juga menjadi fokus utama dalam kurikulum PAI berbasis Al-Qur'an. Siswa didorong untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ibadah sehari-hari seperti shalat dan puasa, hingga perilaku sosial seperti berinteraksi dengan sesama dengan sikap saling menghormati dan menjaga keharmonisan. Pengamalan ini diharapkan dapat membentuk lingkungan sosial yang harmonis dan religius.

Di dalam kurikulum ini, penggunaan metode pengajaran yang variatif dan interaktif juga sangat ditekankan. Guru diharapkan menggunakan berbagai metode seperti diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan role-playing untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Metode-metode ini tidak hanya membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga melibatkan mereka secara aktif dalam proses belajar mengajar. Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta menguatkan pemahaman mereka tentang ajaran Al-Qur'an.

Penilaian dalam kurikulum PAI berbasis Al-Qur'an juga dirancang untuk mengukur tidak hanya pengetahuan kognitif siswa, tetapi juga sikap dan keterampilan mereka dalam

mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Penilaian ini mencakup tes tertulis, observasi perilaku, serta proyek-proyek praktis yang menunjukkan sejauh mana siswa telah menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan mereka. Pendekatan penilaian yang holistik ini membantu memastikan bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga praktis dan aplikatif.

Kurikulum PAI berbasis Al-Qur'an berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan spiritual siswa. Ini melibatkan tidak hanya proses pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti kajian Al-Qur'an, lomba-lomba keagamaan, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, siswa dapat lebih mudah mengembangkan kecintaan mereka terhadap Al-Qur'an dan ajaran Islam, serta membentuk kepribadian yang religius dan berakhlak mulia.

¹ Pengajian Al-Qur'an merupakan model pendidikan agama Islam dasar yang dikelola oleh masyarakat pribumi dengan cara yang sangat sederhana. Fokus utama pendidikan ini adalah pada pengajaran Al-Qur'an. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa pengajian ini biasanya dilaksanakan di surau atau masjid, yang terdapat di hampir setiap desa. Tempat-tempat ini berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer ajaran agama Islam, termasuk ¹ cara membaca Al-Qur'an dan tata cara ibadah yang benar dalam

Islam (Yunus, 1992). Pendidikan ini lebih berorientasi pada tingkat awal atau dasar.

Kurikulum pengajian Al-Qur'an dimulai dengan membaca bagian-bagian tertentu dari ayat Al-Qur'an. Pada tahap awal, peserta didik mulai dengan mempelajari surat Al-Fatihah dan kemudian Juz'ama, yang terdiri dari surat-surat pendek yang penting untuk praktik ibadah sehari-hari (Steenbrink, 1986). Murid-murid belajar huruf Arab, menghafal teks-teks Arab dari Al-Qur'an, serta bacaan dan doa-doa dalam shalat. Proses pembelajaran dilakukan secara individual antara guru dan murid, biasanya di rumah guru atau langgar. Kadang-kadang, pelajaran juga diadakan di rumah murid jika orang tua murid memiliki posisi penting.

Menurut Snouck Hurgronje, sebagaimana dikutip Steenbrink, pelaksanaan pengajian Al-Qur'an dilakukan secara individual. Murid berkumpul di langgar, mushola, atau rumah guru untuk membaca dan melagukan ayat-ayat Al-Qur'an di bawah bimbingan guru selama sekitar $\frac{1}{4}$ hingga $\frac{1}{2}$ jam. Ketika satu murid belajar di hadapan guru, murid lainnya mengulang pelajaran yang telah diajarkan sebelumnya (Steenbrink, 1986).

Muhaimin menambahkan bahwa kurikulum tingkat awal dimulai dengan:

1. Mempelajari bacaan Al-Qur'an tanpa memahami isinya,
2. Belajar bacaan dan praktik shalat, dan

3. Materi tauhid/aqidah atau ketuhanan, yang diakhiri dengan upacara tammatan atau khataman serta upacara sunnatan (Muhaimin, 2003).

Seiring waktu, model pendidikan ini mengalami perubahan, dengan klasifikasi tingkat pendidikan menjadi dua: pertama, pemula yang baru mempelajari huruf hijaiyah hingga dapat membaca; dan kedua, tingkat lanjutan, di mana materi tambahan seperti al-barjanji, qosidah burdah, ilmu tajwid, dan kitab kuning diperkenalkan (Yunus, 1992).

B. Model Kurikulum Berdasarkan Kitab/Pesantren

Pelaksanaan pengajian kitab umumnya mengikuti model pesantren. Model pendidikan pesantren terkait erat dengan kedatangan para pedagang Muslim ke Nusantara pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Sejarah mencatat bahwa Islam telah memasuki Nusantara pada abad ke-11, dan antara abad ke-13 hingga akhir abad ke-17, penyebaran agama Islam berkembang pesat, ditandai dengan berdirinya pusat-pusat kekuasaan Islam di Aceh, Demak, Giri, Ternate, dan Goa. Pada periode ini, pesantren dikenal luas sebagai model pendidikan Islam (Nahrawi, 2008).

Awalnya, kurikulum pendidikan pesantren berfokus pada kitab-kitab yang dipelajari, mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan. Seiring berjalannya waktu, pesantren terus melakukan perbaikan dan pengembangan, termasuk dalam aspek kurikulum, dengan mulai mengakomodasi materi pendidikan umum dalam kurikulum mereka (Asri, 2017). Proses pengajian kitab ini

mirip dengan pengajian Al-Qur'an, dilakukan di surau, langgar, masjid, atau rumah-rumah guru, ustadz, atau kyai. Selanjutnya, pengajian kitab mengalami perkembangan yang signifikan, dengan pesantren menjadi cikal bakal lahirnya madrasah.

Menurut Steenbrink, terdapat tiga perbedaan utama antara pengajian kitab/pesantren dan pengajian Al-Qur'an (Steenbrink, 1986):

1. Dari segi pelaksanaan, santri biasanya tinggal di asrama yang disebut pesantren.
2. Dari segi kurikulum, materi pelajaran mencakup pendidikan tata bahasa seperti Ilmu Nahwu dan Sharaf.
3. Dari segi proses pembelajaran, materi disampaikan melalui dua model: secara individual dan secara kelompok/model Halaqoh.

Kurikulum dalam pengajian kitab, terutama yang mengikuti model pendidikan pesantren, dimulai dengan mempelajari dan menyelesaikan ilmu tata bahasa (Nahwu dan Sharaf). Setelah itu, santri baru diperbolehkan untuk mempelajari ilmu lain seperti fiqih, tafsir, ushuluddin, mantik, tasawuf, hadist, dan berbagai ilmu lainnya. Dalam proses pembelajaran, guru biasanya membacakan teks secara bertahap, baris demi baris, kemudian menerjemahkannya. Jika diperlukan penjelasan lebih lanjut, guru akan memberikan penjelasan tambahan (Steenbrink, 1986).

Sejarah penyebaran Islam di Indonesia menunjukkan bahwa model pendidikan ini juga pernah diterapkan oleh masyarakat Hindu-Buddha. Selain itu, metode pembelajaran dengan model halaqoh atau individual, yang dimulai dengan mempelajari bahasa Arab, juga ditemukan di pusat-pusat pendidikan Islam di Baghdad (Steenbrink, 1986). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pendidikan pesantren merupakan hasil perpaduan antara tradisi Arab-Islam dan budaya Hindu di Jawa, bukan sekadar tradisi murni dari Arab atau Hindu.

Mahmud Yunus (1979), seperti dikutip oleh Muhaimin (2003), menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam dengan model pondokan atau pesantren pada tahun 1900–1908 mencakup:

1. Dimulai dengan mempelajari ilmu tata bahasa (Nahwu, Shorof) serta fiqh menggunakan kitab seperti Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, dan Matan Bina.
2. Melanjutkan dengan ilmu tauhid dan fiqh menggunakan kitab seperti Sanusi, Syaikh Khalid, Kailani, dan Fathul Mu'in.
3. Mempelajari tauhid, Nahwu, Shorof, fiqh, dan tafsir dengan kitab seperti Kifayatul 'Awam, Ibn Aqil, Muhalli, dan Jalalain/Baidlawi.

Tujuan utama dari pendidikan Islam model pesantren adalah menyiapkan lulusan yang ahli dalam ilmu agama Islam. Kurikulum disusun berdasarkan kitab-kitab yang dipilih oleh seorang Kyai.

Proses pembelajaran dimulai dengan kitab-kitab dasar, kemudian berlanjut ke disiplin ilmu yang lebih tinggi, dengan promosi ke tingkat berikutnya ditandai dengan penyelesaian kitab yang telah dipelajari.

Pada era pra-kemerdekaan, pendidikan agama Islam umumnya bersifat informal, berfokus pada pengenalan nilai-nilai ajaran Islam (Daulay, 2007). Kemudian muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti masjid, pesantren, meunasah, rangkrah, dayah, dan surau yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pendidikan. Ciri-ciri utama pada fase ini adalah:

1. Kurikulum berfokus pada pengembangan dan pendalaman ilmu agama dengan pembelajaran kitab-kitab klasik berbahasa Arab.
2. Metode pengajaran menggunakan sistem sorogan, wetonan, dan mudzakaroh/musyawahroh.
3. Sistem yang diterapkan adalah model halaqoh, bukan sistem klasikal.
4. Lulusan diproyeksikan untuk menjadi ulama, kyai, ustadz, guru agama, modin, atau profesi keagamaan lainnya.

BAB VI

¹ KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCA KEMERDEKAAN

Pasca kemerdekaan Indonesia, perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama Islam semakin meningkat. Secara historis, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berlangsung lama, dimulai dari abad ke-20 hingga kini, dan terbagi dalam tiga periode utama: Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Reformasi.

A. Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama, setelah kemerdekaan, terjadi kemajuan signifikan dalam pendidikan Islam, ditandai dengan berdirinya Kementerian Agama (yang sebelumnya dikenal sebagai Departemen Agama pada 3 Januari 1946). Pada 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) memberikan rekomendasi melalui Direktorat Pendidikan Islam bahwa madrasah dan pesantren, sebagai sumber pendidikan yang sudah lama ada di masyarakat Indonesia, harus mendapatkan dukungan nyata berupa bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Selain itu, kebijakan pendidikan agama juga diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, bab XII Pasal 20, yang menetapkan bahwa : a) Mata pelajaran agama harus diajarkan di sekolah-sekolah negeri, dengan persetujuan orang tua untuk mengikuti pelajaran tersebut, dan b) Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah negeri diatur oleh dua kementerian (Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama). Hal ini menandai tahun 1950 sebagai tonggak pengakuan pemerintah terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan formal.

Dalam hal ¹ pengembangan kurikulum madrasah, dilakukan penyesuaian dengan memasukkan sepertiga materi pelajaran agama dan sisanya materi pelajaran umum. Penyesuaian ini menjawab kekhawatiran bahwa madrasah hanya mengajarkan agama tanpa pendidikan umum yang memadai, serta untuk menanggapi anggapan bahwa pelajaran umum di madrasah tidak dapat setara dengan sekolah umum (Ditjen Pendidikan Islam). Pada masa Orde Lama, kurikulum pendidikan agama dibagi menjadi dua jenis: kurikulum 1947 dan kurikulum 1952-1964 (Dhaifi, 2017).

1. Kurikulum 1947

Kurikulum pertama setelah kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai kurikulum 1947, atau disebut juga rencana pelajaran atau dalam bahasa Belanda, *leer plan* (Wahyuni, 2015). Menurut Dhaifi, kurikulum ini mulai diterapkan pada tahun 1950 karena ketidakstabilan politik pada waktu itu. Secara formal, pengembangan kurikulum di Indonesia baru dimulai pada tahun 1950, sehingga kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1950. Pada masa ini, kurikulum pendidikan agama belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, dan kurikulum 1947 masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Pada periode ini, Indonesia yang baru merdeka sedang dalam proses penataan dan pencarian model pendidikan yang ideal. Pendidikan lebih fokus pada pembentukan karakter dan penanaman rasa

nasionalisme untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat.

Rencana Pelajaran 1947, atau kurikulum 1950, untuk jenjang Sekolah Rakyat mencakup enam belas mata pelajaran. Di daerah Sunda, Jawa, dan Madura, mata pelajaran bahasa daerah juga diajarkan. Rincian mata pelajaran meliputi tatacara menulis, berhitung, seni suara, keterampilan tangan, bahasa Indonesia, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan agama. Pada tahun 1951, mata pelajaran agama mulai diajarkan dari kelas 1, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mengajarkan mata pelajaran agama mulai kelas 4 ke atas (Wahyuni, 2015).

2. Kurikulum 1952

Kurikulum 1952 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan sering disebut sebagai rencana pelajaran terurai 1952. Setelah diterbitkannya SKB Dua Menteri (Menteri PP&K dan Menteri Agama) pada tahun 1951, yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama Islam, ditetapkan bahwa materi pendidikan agama Islam harus diajarkan di sekolah umum minimal dua jam per minggu. Menurut Dhaifi, Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) membentuk tim penyusun kurikulum pendidikan agama yang dipimpin oleh K.H. Imam Zarkasyi dari Pesantren

Modern Gontor. Kurikulum yang disusun ini disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Implementasi kurikulum ini mengakibatkan porsi 25% untuk pendidikan agama dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah selama satu minggu (Dhaifi, 2017).

3. Kurikulum 1964

Kurikulum 1964, atau yang dikenal sebagai Rencana Pendidikan 1964, memiliki ciri khas di mana pemerintah bertujuan agar masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan akademik sebagai dasar pendidikan di tingkat SD. Proses pembelajaran berfokus pada program Pancawardhana, yang meliputi pengembangan aspek: 1) cipta, 2) rasa, 3) karsa, 4) karya, dan 5) moral (Hidayat, 2013, p. 3). Kurikulum ini membagi mata pelajaran ke dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, artistik/emosional, keterampilan, dan jasmani.

1 B. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Era Orde Baru

1 Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia terus dilakukan seiring dengan perubahan zaman, kepemimpinan, dan politik. Pada era Orde Baru, kebijakan pendidikan madrasah lebih melanjutkan dan meningkatkan kebijakan dari masa Orde Lama. Menurut Nurhayati, pada masa Orde Baru, madrasah berfungsi sebagai lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan **1** Kementerian Agama dan belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional

(Nurhayati, 2013). Masalah ini disebabkan oleh dominasi muatan agama dalam kurikulum madrasah, ketidakseragaman struktur kurikulum, dan kurangnya standar baku serta pemantauan konsisten oleh pemerintah.

Untuk mengatasi masalah ini, Menteri Agama pada saat itu melakukan perbaikan dan pengembangan, yang menghasilkan kebijakan sesuai ketetapan MPRS Nomor XXVII Tahun 1966 Pasal 1. Ketetapan ini menyatakan bahwa PAI harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah umum dari tingkat dasar hingga universitas (Daulay, 2007). Pasal 4 ketetapan tersebut memuat kebijakan tentang isi pendidikan agama, dengan tujuan untuk: a) Meningkatkan jiwa, mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama anak, b) Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, serta c) Memperkuat fisik yang sehat dan kuat. Ini menunjukkan bahwa reformasi dan restrukturisasi madrasah menjadi agenda utama pemerintah pada masa Orde Baru.

Ketetapan MPRS No. XXVII/1966 tentang “Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan” menggarisbawahi peran penting agama dengan beberapa pertimbangan: a) Pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagai unsur mutlak untuk nation and character building, b) Pancasila sebagai dasar untuk meningkatkan martabat manusia, dan c) Moral dan mental manusia sebagai faktor penting dalam meningkatkan ketahanan revolusi Indonesia.

Ketetapan ini memberikan status penting bagi PAI, menjadikannya matapelajaran pokok yang wajib diikuti oleh semua peserta didik dan menjadi syarat kelulusan ujian akhir

(Mukhtar, 1999, p. 139). Pada era Orde Baru, kurikulum pendidikan agama terus disempurnakan, melanjutkan kurikulum masa Orde Lama seperti kurikulum 1947 dan 1952, yang kemudian disempurnakan dengan munculnya kurikulum 1964, 1968, 1975, 1984 (sering disebut kurikulum CBSA), 1994, dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum PAI terus berkembang seiring waktu secara berkelanjutan. Berikut beberapa model kurikulum yang diterapkan pada era Orde Baru:

1. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 muncul sebagai pengembangan dari kurikulum 1964, yang dipengaruhi oleh perubahan sistem politik dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru. Kurikulum ini menggantikan kurikulum 1964 dan mengalami perubahan struktur dengan mengalihkan penekanan dari Pancawardhana ke pendekatan organisasi materi pelajaran, yang dibagi menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus (Hidayat, 2013, p. 4). Kurikulum ini mencakup 9 matapelajaran yang diarahkan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, cerdas, dan terampil, serta memiliki moral, budi pekerti, dan keyakinan agama yang kuat. Matapelajaran pendidikan agama tetap sama dengan kurikulum sebelumnya.

2. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Kurikulum ini diterapkan

mulai dari jenjang SD hingga SMP, dan pada tahun 1976 disusun serta diterapkan untuk sekolah keguruan seperti SPG, STM, dan SMEA. Pada kurikulum ini, istilah satuan pelajaran diperkenalkan sebagai rencana pelajaran untuk setiap pembahasan. Tujuan pendidikan dan pengajaran terbagi menjadi tiga ranah: a) tujuan institusional, b) tujuan kurikuler, c) tujuan instruksional umum dan khusus. Menurut Hidayat (2013), prinsip-prinsip kurikulum ini adalah:

- a. Berorientasi pada tujuan
- b. Menganut pendekatan integratif
- c. Menekankan pada efektivitas dan efisiensi daya dan waktu
- d. Menganut pendekatan sistem yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI)

Pada kurikulum 1975, matapelajaran agama Islam mengalami perubahan signifikan setelah munculnya SKB 3 menteri (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri P&K). Perubahan signifikan ini meliputi peningkatan porsi pendidikan agama menjadi 30% dan pendidikan umum 70%, ijazah lembaga madrasah setara dengan ijazah sekolah umum, dan pengakuan mutasi/pindah antar lembaga madrasah ke sekolah umum (Dhaifi, 2017).

3. Kurikulum 1984 (Kurikulum CBSA)

Kurikulum 1984, sering disebut kurikulum CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) atau Student Active Learning (SAL), menekankan

pendekatan keterampilan proses, meskipun tujuan tetap menjadi penting. Ini dianggap sebagai perbaikan dari kurikulum 1975. Ciri-cirinya meliputi:

- a. Berorientasi pada tujuan pembelajaran (instruksional).
 - b. Pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui sistem CBSA.
 - c. Materi pelajaran dikemas dengan model pendekatan spiral, di mana semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi yang diberikan.
 - d. Dimulai dengan penanaman pengertian sebelum latihan.
 - e. Materi disampaikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa.
 - f. Menggunakan pendekatan keterampilan proses, menekankan pada pembentukan keterampilan dalam memperoleh dan mengkomunikasikan pengetahuan.
4. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 disusun untuk menyempurnakan kurikulum 1984, didasarkan pada undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ciri-ciri utama dari kurikulum ini meliputi:

- a. Sistem caturwulan menjadi model pembagian tahapan pelajaran.
- b. Pelajaran lebih menekankan pada materi/isi yang cukup padat.

- c. Bersifat populis, memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di Indonesia.
- d. Proses KBM mengharuskan guru menggunakan strategi yang melibatkan siswa secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial.
- e. Pengajaran dimulai dari hal konkret ke abstrak, mudah ke sulit, sederhana ke kompleks.
- f. Pengulangan materi yang sulit dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa.

Namun, beberapa masalah muncul dengan kurikulum ini karena terlalu fokus pada penguasaan materi (content-oriented). Masalah tersebut meliputi beban siswa yang terlalu berat, materi pelajaran yang sulit, kurang relevan dengan perkembangan berpikir siswa, dan kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, Suplemen Kurikulum 1994 disusun dan diberlakukan. Menurut Dhaifi, kurikulum 1994 adalah hasil dari memadukan dan mengembangkan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada periode ini, madrasah ditegaskan sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam, dengan isi, struktur, dan konsep kurikulumnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 (Dhaifi, 2017).

C. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pasca Reformasi Hingga Sekarang

Perubahan dalam kepemimpinan rezim berpengaruh pada kebijakan pendidikan, termasuk perubahan kurikulum yang berlaku. Pada era reformasi, terdapat beberapa perubahan kurikulum yang signifikan, antara lain:

1. Kurikulum 2004 (KBK)

Kurikulum 2004 dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Menurut Hidayat, kurikulum ini telah disusun sejak tahun 2002 sebagai upaya untuk menyempurnakan Kurikulum 1994, merespons perubahan struktural pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik (Hidayat, 2013). Penyempurnaan berlanjut hingga tahun 2004, dan kurikulum ini lebih dikenal sebagai Kurikulum 2004. Pendidikan berbasis kompetensi dalam kurikulum ini menekankan pengembangan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai standar kinerja yang ditetapkan. Artinya, pendidikan diarahkan pada persiapan individu siswa untuk menguasai seperangkat kompetensi tertentu yang telah ditentukan. Ciri-ciri Kurikulum KBK meliputi:

- a. Penekanan pada pencapaian kompetensi siswa, baik secara individu maupun klasikal.
- b. Berorientasi pada hasil belajar siswa (learning outcomes) dan keberagaman.

- c. Menggunakan pendekatan dan metode yang variatif.
- d. Sumber belajar tidak terbatas pada guru, tetapi mencakup sumber-sumber edukatif lainnya.
- e. ¹ Penilaian lebih menekankan pada proses dan hasil belajar dalam pencapaian kompetensi.

2. Kurikulum 2006 (KTSP)

Kurikulum 2006, yang dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), diarahkan untuk mengimplementasikan regulasi dalam PP No. 19 tahun 2005. Meskipun esensinya masih berfokus pada pencapaian paket-paket kompetensi, bukan sekadar penyelesaian materi pelajaran. Kurikulum KTSP memiliki kesamaan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam hal pencapaian kompetensi, namun perbedaannya terletak pada kewenangan penyusunan. KTSP mengacu pada sistem desentralisasi pendidikan, di mana pemerintah hanya menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sekolah atau madrasah bertugas mengembangkan silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi lokal sekolah dan daerah masing-masing. Menurut Wina Sanjaya, dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, Ayat 15), KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (Sanjaya, 2010).

3. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dirancang sebagai upaya penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2006 atau KTSP. Untuk mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai dengan standar nasional, pemerintah menetapkan peraturan menteri agama RI tentang kurikulum madrasah 2013 untuk mata pelajaran PAI dan bahasa Arab. Tujuan Kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia yang mampu hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kurikulum 2013 menekankan nilai-nilai keagamaan yang tidak hanya terbatas pada mata pelajaran PAI tetapi juga terintegrasi ke seluruh mata pelajaran yang diajarkan. PAI dalam Kurikulum 2013 memiliki ciri khas Tematik Integratif. Pembelajaran PAI dalam Kurikulum 2013 lebih menekankan penguatan moral, akhlak, dan karakter peserta didik dalam pemahaman agama dan praktik ibadah, bukan hanya sekedar pembelajaran tekstualis dan dogmatis semata.

BAB VII

KURIKULUM MADRASAH

A. Pengertian Madrasah

Madrasah secara terminologis berasal dari bahasa Arab “madrasah,” yang berarti tempat belajar. Dalam konteks pendidikan Islam, madrasah merujuk pada institusi pendidikan yang fokus pada pengajaran agama Islam, termasuk Al-Qur’an, Hadis, Fiqh, dan bahasa Arab, serta ilmu-ilmu umum yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Sejarah madrasah di Indonesia dimulai sejak kedatangan Islam ke Nusantara. Pada awalnya, pendidikan Islam diajarkan di masjid-masjid dan surau-surau oleh para ulama. Dengan perkembangan zaman, madrasah kemudian didirikan sebagai lembaga formal untuk memberikan pendidikan agama secara lebih terstruktur.

Madrasah di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkatannya, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas. Selain itu, terdapat juga Madrasah Diniyah dan Madrasah Takmiliyah yang fokus pada pendidikan non-formal. Peran madrasah tidak hanya terbatas pada pengajaran ilmu-ilmu agama, tetapi juga mencakup pendidikan karakter dan moral. Madrasah bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, beriman, dan beramal saleh.

Pendidikan di madrasah mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum agama. Hal ini memungkinkan siswa madrasah untuk mendapatkan pengetahuan umum yang setara dengan siswa di sekolah umum, sekaligus memperdalam pengetahuan agama Islam. Madrasah di Indonesia berada di bawah pengawasan Kementerian Agama. Hal ini berbeda dengan sekolah umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengawasan oleh Kementerian Agama memastikan bahwa madrasah tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajarannya.

Sistem pendidikan di madrasah sering kali menekankan pada pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis, pemahaman Fiqh, sejarah Islam, dan bahasa Arab. Selain itu, madrasah juga mengajarkan mata pelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum nasional. Madrasah memainkan peran penting dalam mempertahankan dan menyebarkan budaya Islam di Indonesia. Lulusan madrasah diharapkan mampu menjadi pemimpin yang bijaksana dan berakhlak mulia, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pada era modern, madrasah menghadapi tantangan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Banyak madrasah yang telah mulai mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Madrasah juga berperan

dalam membangun toleransi beragama dan kedamaian sosial. Dengan mengajarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi alam semesta), madrasah membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. Madrasah bukan hanya institusi pendidikan agama, tetapi juga lembaga yang membentuk karakter dan moral generasi muda, mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam masyarakat dengan landasan iman dan pengetahuan yang kuat.

1 B. Madrasah Era SKB 3 Menteri

Sebelum adanya SKB 3 Menteri, pengelolaan dan pembinaan sekolah dan madrasah berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Keppres No 34 Tahun 1972 dan Inpres No 15 Tahun 1974. Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam terkait kemungkinan penghapusan sistem pendidikan madrasah. Kekhawatiran ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Selain itu, pada tahun 1970-an, pemerintah mulai mempertimbangkan cara **1** memadukan model pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu upaya pemerintah adalah memperkuat struktur jenjang dan kurikulum madrasah, sehingga lulusan madrasah dapat memperoleh pengakuan yang setara dengan lulusan sekolah umum dan bisa melanjutkan pendidikan di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah awal integrasi madrasah **1** ke dalam sistem pendidikan

nasional ini ditandai dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri pada tahun 1974 tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah (Mukhtar, 1999).

Setelah keluarnya SKB 3 Menteri pada tahun 1975, khususnya pada dekade 90-an, eksistensi madrasah semakin diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini berarti pelaksanaan pendidikan nasional tidak hanya mengandalkan jalur pendidikan formal di sekolah, tetapi juga pendidikan luar sekolah. Pada era Orde Baru, pemerintah berusaha menyusun Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan UU No. 4 Tahun 1950 Jo. No 2 Tahun 1954. Menurut Mukhtar, undang-undang ini memberikan penegasan pada madrasah melalui kebijakan yang lebih operasional serta memasukkannya dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan ciri khas keagamaannya. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional (Mukhtar, 1999).

Kelahiran SKB 3 Menteri terutama untuk merespons kekhawatiran umat Islam terhadap kemungkinan penghapusan sistem pendidikan madrasah akibat Keppres tahun 1972 dan Inpres tahun 1974. Pemerintah, melalui Departemen Agama yang saat itu dipimpin oleh Menteri Agama Mukti Ali, mengadakan sidang kabinet terbatas pada 26 November 1974 yang menghasilkan SKB 3 Menteri. Presiden kemudian mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Keppres dan Inpres yang menegaskan

bahwa pembinaan pendidikan umum menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan pendidikan agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama. Selain itu, pelaksanaan Keppres dan Inpres tersebut memerlukan kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Agama.

C. Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah/MI

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah tingkat pendidikan dasar dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, yang setara dengan sekolah dasar (SD) dalam pendidikan umum. MI bertujuan untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak usia 6 hingga 12 tahun, dengan penekanan pada pembelajaran ilmu agama Islam dan pengetahuan umum. Kurikulum di MI mencakup pengajaran Al-Qur'an, Hadis, Fiqh, dan Akhlak, serta mata pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. MI berfungsi sebagai fondasi untuk membentuk karakter dan pengetahuan siswa sejak usia dini dengan pendekatan yang berlandaskan ajaran Islam.

Salah satu ciri khas dari MI adalah integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Di MI, siswa diajarkan untuk menghafal Al-Qur'an, memahami ajaran Islam, serta mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengajaran di MI seringkali

melibatkan pendekatan kontekstual dan partisipatif, dengan tujuan agar siswa dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

MI memiliki struktur kurikulum yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu, dengan pembelajaran agama sebagai pusat dari kurikulum. Pendidikan di MI tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan akhlak dan keterampilan sosial siswa. Pengajaran di MI seringkali melibatkan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan praktis, seperti pengajian, peringatan hari-hari besar Islam, dan berbagai lomba keagamaan. Dengan pendekatan yang komprehensif, MI berusaha menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan spiritual, moral, dan intelektual siswa.

Dalam hal administrasi dan manajemen, MI beroperasi di bawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang memastikan bahwa lembaga ini mengikuti standar dan kebijakan pendidikan nasional. Kepala MI, guru, dan staf lainnya bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum dan menjaga kualitas pendidikan di lembaga tersebut. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat, MI berperan penting dalam penyediaan pendidikan yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Islam, serta dalam mempersiapkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak mulia.

Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia yang dirancang khusus untuk tingkat pendidikan dasar, setara dengan Sekolah Dasar (SD). Kurikulum ini mengintegrasikan pendidikan umum dan agama, bertujuan untuk membentuk karakter serta pengetahuan siswa dalam konteks Islam dan keilmuan umum.

1. Struktur Kurikulum

Kurikulum MI biasanya mencakup sejumlah mata pelajaran yang dirancang untuk memberikan landasan pendidikan yang komprehensif. Pada umumnya, kurikulum MI terdiri dari dua kelompok mata pelajaran utama: mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama. Mata pelajaran umum meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PPKn, sementara mata pelajaran agama mencakup Al-Qur'an, Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

2. Tujuan Pendidikan

Kurikulum MI bertujuan untuk mendidik siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki pemahaman dan praktik agama yang kuat. Tujuan ini mencakup pengembangan aspek intelektual, emosional, dan spiritual siswa. Melalui pendidikan agama yang terintegrasi, siswa diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka.

3. Metode Pengajaran

Dalam pelaksanaan kurikulum, madrasah Ibtidaiyah menggunakan berbagai metode pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode tersebut meliputi pembelajaran berbasis kegiatan, diskusi, dan penggunaan media pembelajaran yang sesuai. Pendekatan ini dirancang untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif serta untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam tentang materi ajar.

4. Penilaian dan Evaluasi

Penilaian dalam MI tidak hanya mengukur pencapaian akademis tetapi juga pencapaian dalam aspek agama. Evaluasi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk ujian tulis, praktik, dan penilaian harian. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami materi tetapi juga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

5. Kurikulum Terintegrasi

Kurikulum MI berusaha mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan umum dan pemahaman agama. Dengan cara ini, siswa dapat memperoleh pendidikan yang holistik yang mencakup aspek spiritual dan intelektual.

6. Perubahan dan Pembaharuan

Seiring dengan perubahan kebijakan pendidikan nasional, kurikulum MI juga mengalami berbagai pembaharuan. Kurikulum terbaru sering kali disesuaikan dengan standar nasional dan kebijakan pemerintah. Pembaharuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan zaman.

7. Kurikulum 1975 dan 1984

Pada era 1975 dan 1984, kurikulum MI mengalami perubahan signifikan. Kurikulum 1975 lebih menekankan pada efisiensi dan efektivitas pengajaran, sementara Kurikulum 1984 memperkenalkan pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang lebih menekankan pada pengembangan keterampilan proses.

8. Kurikulum 1994 dan 1999

Kurikulum MI juga diperbarui dengan kurikulum 1994 dan suplemennya pada 1999. Pembaharuan ini melibatkan penambahan materi pelajaran umum dan penyesuaian komposisi mata pelajaran agama. Tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan kurikulum MI dengan kurikulum sekolah umum dan memastikan kesetaraan dalam standar pendidikan.

9. Kurikulum 2004 dan 2006

Dalam kurikulum 2004 (KBK) dan 2006 (KTSP), MI mengikuti pendekatan berbasis kompetensi yang menekankan pencapaian standar kompetensi tertentu. Kurikulum ini memungkinkan madrasah untuk menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan lokal dan konteks sosial siswa.

10. ¹ Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan upaya penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dengan penekanan pada penguatan karakter, moral, dan integrasi nilai-nilai agama dalam seluruh mata pelajaran. Kurikulum ini bertujuan untuk menyiapkan siswa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang baik dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat.

D. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah/MTs

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah tingkat pendidikan menengah pertama dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama (SMP) dalam sistem pendidikan umum. MTs melayani siswa usia 12 hingga 15 tahun dan berfokus pada pengembangan pengetahuan akademis dan agama secara lebih mendalam. Kurikulum MTs mencakup mata pelajaran agama seperti Al-Qur'an, Hadis, Fiqh, dan Akhlak, serta mata pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dengan

pendekatan integratif, MTs bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam.

Salah satu fitur utama dari MTs adalah pengembangan kurikulum yang menggabungkan pendidikan agama dan umum dalam satu kesatuan. Kurikulum di MTs dirancang untuk memperdalam pemahaman siswa tentang ajaran Islam sambil mengembangkan keterampilan akademis mereka. Siswa di MTs tidak hanya belajar teori, tetapi juga diajarkan untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran sering kali melibatkan diskusi, praktikum, dan kegiatan yang mendukung pembentukan karakter serta keterampilan sosial siswa.

Selama di MTs, siswa memulai persiapan untuk pendidikan lebih lanjut di tingkat menengah atas, baik dalam jalur pendidikan umum maupun agama. MTs berperan sebagai jembatan antara pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) atau sekolah menengah umum. Dengan demikian, MTs mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan akademik dan sosial di tingkat yang lebih tinggi, sambil terus memperkuat dasar-dasar agama yang telah mereka pelajari di tingkat sebelumnya.

Dari segi administrasi, MTs berada di bawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia dan harus mematuhi standar serta kebijakan pendidikan yang ditetapkan. Kepala MTs,

guru, dan staf bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kurikulum diimplementasikan secara efektif dan bahwa siswa memperoleh pendidikan yang berkualitas. MTs juga berperan dalam memfasilitasi pengembangan karakter dan keterampilan praktis melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program-program tambahan yang mendukung pembelajaran di luar kelas. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, MTs berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mempersiapkan generasi penerus yang kompeten dan berakhlak mulia.

Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah kurikulum yang diterapkan pada tingkat pendidikan menengah pertama dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kurikulum ini dirancang untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh, mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan agama, serta membekali siswa dengan keterampilan yang relevan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau untuk menghadapi tantangan di masyarakat.

1. Struktur Kurikulum

Kurikulum MTs terdiri dari dua kelompok mata pelajaran utama: mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama. Mata pelajaran umum mencakup Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sementara itu, mata

pelajaran agama meliputi Al-Qur'an, Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab. Kurikulum MTs dirancang untuk memberikan keseimbangan antara ilmu pengetahuan umum dan agama.

2. Tujuan Pendidikan

Kurikulum MTs bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang memiliki pengetahuan luas, keterampilan praktis, dan pemahaman agama yang mendalam. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk mempersiapkan siswa agar dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, baik di madrasah aliyah (MA) maupun sekolah umum, serta menjadi anggota masyarakat yang berilmu dan berakhlak mulia.

3. Metode Pengajaran

Pendekatan pengajaran di MTs menggunakan berbagai metode untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode yang digunakan termasuk pembelajaran aktif, diskusi kelompok, praktik, dan penggunaan media pembelajaran. Tujuan metode ini adalah untuk memastikan siswa tidak hanya memahami materi tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

4. Penilaian dan Evaluasi

Penilaian dalam MTs meliputi evaluasi terhadap pencapaian akademis serta pemahaman agama siswa. Penilaian dilakukan

melalui berbagai bentuk, termasuk ujian tulis, praktik, dan observasi harian. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kemajuan siswa dalam memahami dan menerapkan materi yang telah dipelajari.

5. Kurikulum Terintegrasi

Kurikulum MTs mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh dan seimbang, memastikan bahwa siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan ilmiah tetapi juga pemahaman dan aplikasi nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka.

6. Kurikulum 1975 dan 1984

Pada era kurikulum 1975 dan 1984, MTs mengalami perubahan dalam kurikulum yang lebih menekankan pada efisiensi pengajaran dan pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum 1984, misalnya, memperkenalkan pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang lebih menekankan keterampilan proses dan pembelajaran aktif.

7. Kurikulum 1994 dan 1999

Kurikulum MTs mengalami pembaharuan dengan kurikulum 1994 dan suplemennya pada 1999. Pembaharuan ini melibatkan penambahan dan penyesuaian komposisi mata pelajaran, dengan fokus pada penyesuaian antara kurikulum madrasah dan sekolah umum untuk memastikan kesetaraan pendidikan.

8. Kurikulum 2004 dan 2006

Kurikulum 2004 (KBK) dan 2006 (KTSP) membawa pendekatan berbasis kompetensi yang menekankan pencapaian standar kompetensi tertentu. Di MTs, ini memungkinkan penyesuaian materi ajar dengan kebutuhan lokal dan konteks sosial siswa, serta memberikan ruang bagi madrasah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

9. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dengan penekanan pada penguatan karakter, moral, dan integrasi nilai-nilai agama dalam semua mata pelajaran. Kurikulum ini bertujuan untuk menyiapkan siswa menjadi individu yang berkompeten dan memiliki karakter yang baik, siap menghadapi tantangan global.

10. Implementasi dan Perkembangan

Penerapan kurikulum MTs di lapangan melibatkan adaptasi dan penyempurnaan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan dan kebijakan pemerintah. Pembaharuan kurikulum dilakukan secara berkala untuk memastikan kurikulum tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional serta kebutuhan lokal.

E. Kurikulum Madrasah Aliyah/MA

Madrasah Aliyah (MA) adalah jenjang pendidikan menengah atas dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas (SMA) dalam sistem pendidikan umum. MA melayani siswa usia sekitar 15 hingga 18 tahun dan berfokus pada pendidikan yang lebih mendalam dan spesifik baik dalam aspek akademis maupun agama. Kurikulum MA dirancang untuk memberikan pengetahuan mendalam dalam mata pelajaran agama Islam seperti Tafsir, Hadis, Fiqh, dan Aqidah, serta mata pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dengan kurikulum ini, MA bertujuan untuk menyiapkan siswa baik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun untuk berkontribusi dalam masyarakat dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Salah satu ciri khas dari MA adalah penguatan pendidikan agama yang lebih intensif dibandingkan dengan tingkat pendidikan sebelumnya. Di MA, siswa tidak hanya mempelajari teori-teori agama secara mendalam, tetapi juga diberikan keterampilan praktis dalam penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. MA juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi ujian akhir yang mencakup pengetahuan agama dan umum, serta memberikan pelatihan untuk memperkuat kemampuan berbicara dan menulis dalam konteks agama dan akademis.

MA berperan penting sebagai jembatan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Siswa di MA dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, baik di institusi pendidikan umum maupun perguruan tinggi agama. Selain itu, MA juga menyiapkan siswa untuk berperan dalam berbagai bidang profesional dengan memadukan pengetahuan agama dan keterampilan akademis. Dengan dukungan dari kurikulum yang menyeluruh dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung, MA berusaha mencetak lulusan yang tidak hanya berkompeten dalam bidang akademis tetapi juga memiliki pemahaman agama yang kuat dan akhlak yang baik.

Dalam hal administrasi dan pengelolaan, MA berada di bawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menetapkan standar dan kebijakan pendidikan untuk memastikan kualitas dan keselarasan dengan visi pendidikan nasional. Kepala MA, bersama dengan guru dan staf, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kurikulum dilaksanakan dengan baik dan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. MA juga berperan dalam melibatkan masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan, serta dalam menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan siswa secara optimal.

Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) adalah kurikulum yang diterapkan di tingkat pendidikan menengah atas dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, setara dengan Sekolah Menengah

Atas (SMA). Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang komprehensif, baik dalam bidang agama maupun umum, sehingga mereka siap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja. Kurikulum MA mengintegrasikan pendidikan agama dengan mata pelajaran umum untuk memastikan siswa mendapatkan pemahaman yang seimbang dan mendalam.

Kurikulum MA terdiri dari dua kelompok mata pelajaran utama: mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama. Mata pelajaran umum meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sementara itu, mata pelajaran agama mencakup Al-Qur'an, Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab. Struktur ini dirancang untuk memberikan siswa bekal pengetahuan yang luas dan mendalam di kedua bidang tersebut.

Metode pengajaran di MA bervariasi dan melibatkan pendekatan yang beragam untuk memastikan siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam praktik. Metode ini mencakup pembelajaran berbasis proyek, diskusi, presentasi, dan praktik langsung. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan praktis siswa.

Penilaian dan evaluasi di MA dilakukan melalui berbagai bentuk, termasuk ujian tertulis, ujian praktik, tugas individu

dan kelompok, serta evaluasi harian. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kemajuan siswa dalam menguasai materi dan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap aspek moral dan sikap siswa, untuk memastikan perkembangan holistik.

Kurikulum MA juga mengalami berbagai perubahan seiring dengan pembaharuan kebijakan pendidikan nasional. Kurikulum 1975 dan 1984 memperkenalkan pendekatan baru dalam pengembangan keterampilan proses dan pembelajaran aktif, sedangkan Kurikulum 1994 dan 1999 membawa penyesuaian untuk menyelaraskan kurikulum MA dengan standar nasional.

Pada era Kurikulum 2004 (KBK) dan 2006 (KTSP), penekanan diberikan pada pencapaian kompetensi dan pengembangan keterampilan siswa. Kurikulum ini memungkinkan madrasah untuk menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan lokal dan konteks sosial siswa, memberikan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum.

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan fokus pada integrasi nilai-nilai agama dalam semua mata pelajaran, penguatan karakter, moral, dan keterampilan hidup. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan global.

Penerapan kurikulum di MA terus berkembang mengikuti kebijakan pendidikan nasional dan kebutuhan lokal. Upaya berkelanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan, serta menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kurikulum Madrasah Aliyah dirancang untuk memberikan pendidikan yang seimbang antara ilmu pengetahuan umum dan agama, dengan tujuan utama mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kurikulum ini berfungsi untuk membentuk generasi yang tidak hanya terampil secara akademis tetapi juga berakhlak baik dan siap berkontribusi dalam masyarakat.

BAB VIII

MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM

1

A. Model Pengembangan Kurikulum Menurut Ralph Tyler

Ralph Tyler, lahir pada 22 April 1902 di Chicago, adalah seorang pendidik Amerika yang terkenal dalam bidang penilaian dan evaluasi. Selama hidupnya, Tyler terlibat dalam berbagai lembaga yang menetapkan pedoman pendidikan, yang berkontribusi pada pengembangan Undang-Undang Pendidikan Dasar di Amerika pada tahun 1965. Pada siang hari, Tyler bekerja sebagai pendidik, sementara malam harinya ia menjalankan pekerjaan sebagai operator telegram kereta api. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1921 dari Doane College di Kreta, Nebraska, saat usianya baru 19 tahun. Karier mengajarnya dimulai sebagai guru sekolah menengah di Pierre, South Dakota. Selanjutnya, ia memperoleh gelar master dari Universitas Nebraska pada tahun 1923 dan gelar Ph.D. dari Universitas Chicago pada tahun 1927.

Sebagai pelopor dalam pengembangan kurikulum, Tyler dikenal karena menekankan pentingnya pendekatan yang rasional, sistematis, dan berarti dalam tugas-tugas pendidikan. Meskipun kontribusinya diakui, beberapa penulis sebelumnya meremehkan pandangannya. Ada kritik yang menyatakan bahwa Tyler tidak menjelaskan sumber-sumber tujuan secara memadai. Namun, Tyler sebenarnya telah membahas hal tersebut secara mendalam dalam bukunya, di mana ia menguraikan dan menganalisis berbagai sumber tujuan, termasuk kebutuhan anak didik, kehidupan kontemporer, mata pelajaran akademik, filsafat, dan psikologi belajar. Meskipun demikian, Tyler tidak memberikan

langkah-langkah konkret untuk pengembangan kurikulum, melainkan hanya menyediakan dasar-dasar teoritisnya.

Model pengembangan kurikulum ini dapat diuraikan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Objectives (Menentukan Tujuan Pendidikan yang Diharapkan)

Pada tahap ini, tujuan pendidikan ditetapkan melalui beberapa langkah, yaitu mempelajari kebutuhan siswa sebagai dasar tujuan, memahami kondisi kehidupan kontemporer di masyarakat, serta menentukan tujuan berdasarkan tinjauan filosofis dan psikologis. Tujuan pendidikan harus mencerminkan pemahaman terhadap siswa, masyarakat, dan prinsip-prinsip pendidikan yang relevan.

2. Selecting Learning Experiences (Menentukan Pengalaman Belajar)

Dalam menentukan pengalaman belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan, beberapa prinsip harus dipertimbangkan: memberikan kesempatan bagi siswa untuk berperilaku sesuai tujuan, memastikan pengalaman belajar menyenangkan, melibatkan siswa secara aktif, dan menyediakan pengalaman yang dapat mencapai tujuan pendidikan serta mengembangkan berbagai kemampuan. Setelah menetapkan tujuan umum, perencana kurikulum menyaring dan memperjelas tujuan tersebut melalui

pendekatan filosofis dan psikologis untuk menghasilkan tujuan pembelajaran yang spesifik.

Selanjutnya, penting untuk menyusun garis-garis besar nilai-nilai yang akan diperoleh dari pengalaman belajar dan mengilustrasikannya dengan menekankan empat tujuan demokratis. Pendidik harus memahami prinsip-prinsip belajar yang efektif dan pertimbangan durasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan serta efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan. Tyler juga menyarankan agar pendidik fokus pada cara belajar yang dapat:

- Mengembangkan kemampuan berpikir
- Membantu memperoleh informasi
- Meningkatkan sikap sosial
- Mendorong minat
- Memperkuat sikap kemasyarakatan

3. Organizing Learning Experiences (Mengorganisasi Pengalaman Belajar)

Pada tahap ini, pengalaman belajar yang telah ditentukan diorganisasi dan disusun sedemikian rupa untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan.

4. Evaluation (Mengevaluasi Efektivitas Pengalaman Belajar)

Evaluasi dilakukan untuk mengukur ¹efektivitas pengalaman belajar dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah

ditetapkan. Evaluasi bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa dan menentukan sejauh mana tujuan telah tercapai.

Tyler (1949) menekankan pentingnya membedakan antara konten pelajaran atau kegiatan belajar dan pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah hasil dari interaksi siswa dengan konten dan kegiatan belajar. Untuk mengembangkan pengalaman belajar yang efektif, perancang kurikulum harus merancang dan melaksanakan pengalaman belajar dengan baik. Kurikulum dapat dilihat dari perspektif yang sempit, yaitu pengalaman yang diperoleh di sekolah, atau dari perspektif yang lebih luas, termasuk pengalaman di luar sekolah.

B. Model Pengembangan Kurikulum Menurut Hylda Taba

Proses pengembangan kurikulum menurut Taba melibatkan lima langkah utama. Proses ini dimulai dengan melaksanakan unit-unit eksperimen bersama para guru. Di sini, dilakukan studi mendalam mengenai hubungan antara teori dan praktik. Perencanaan didasarkan pada teori yang solid, sementara data yang diperoleh dari eksperimen di kelas digunakan untuk menguji kekuatan teori tersebut.

Ada delapan langkah yang diikuti dalam kegiatan unit eksperimen menurut Taba, yaitu: mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan-tujuan spesifik, memilih konten, mengorganisasi konten, memilih pengalaman belajar, mengevaluasi, menetapkan urutan, dan memastikan keseimbangan. Setelah unit eksperimen diuji di kelas eksperimen,

langkah berikutnya adalah menguji kurikulum di kelas atau lokasi lain untuk mengevaluasi validitas dan mendapatkan data untuk perbaikan.

Setelah melakukan penyempurnaan atau revisi, dilakukan konsolidasi untuk menarik kesimpulan umum. Kesimpulan ini mungkin belum tentu berlaku di sekolah lain. Kemudian, dilakukan ¹ **pengkajian oleh ahli kurikulum untuk memastikan bahwa konsep yang digunakan sesuai**. Selanjutnya, **kurikulum diterapkan secara lebih luas, tidak hanya di sekolah tempat eksperimen dilakukan**, untuk mengidentifikasi masalah terkait ¹ **pendidikan, fasilitas, dan pembiayaan**.

Taba menerapkan **pendekatan berbasis akar rumput** dalam pengembangan **kurikulum**, meyakini bahwa kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan ditetapkan oleh otoritas. Menurut Taba, guru harus memulai proses dengan menciptakan unit pembelajaran khusus untuk siswa mereka, alih-alih terlibat dalam perancangan kurikulum umum.

Salah satu karya terkenal dan berpengaruh besar dari Hilda Taba adalah buku ¹ **Curriculum Development: Theory and Practice (1962)**. Dalam buku ini, **Taba** memaparkan pendekatannya terhadap **proses pengembangan kurikulum**. Ia mengadaptasi model dasar Tyler agar lebih sesuai dengan pengembangan kurikulum di berbagai sekolah. Berbeda dari pendekatan deduktif yang umum digunakan, Taba mengembangkan model ini secara induktif, yang sering disebut sebagai “Model Terbalik” ¹ **atau “Inverted Model”**.

Model pengembangan kurikulum menurut Taba dimulai dengan percobaan, penyusunan teori, dan kemudian penetapan kurikulum. Pendekatan ini bertujuan untuk lebih menyelaraskan teori dengan praktik serta mengurangi sifat umum dan abstrak yang sering muncul dalam kurikulum tanpa percobaan.

Taba menganjurkan untuk memperoleh informasi masukan (input) pada setiap langkah proses kurikulum. Secara khusus, ia merekomendasikan penggunaan pertimbangan ganda terkait isi (organisasi kurikulum yang logis) dan individu pelajar (psikologis kurikulum).

Taba juga berpendapat bahwa setiap kurikulum terdiri dari elemen-elemen dasar. Kurikulum biasanya mencakup seleksi dan organisasi isi, yang merupakan manifestasi dari pola-pola belajar dan mengajar. Evaluasi hasil dari program tersebut juga dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Taba berpendapat bahwa proses deduktif yang umum digunakan cenderung membatasi kemungkinan inovasi kreatif, karena mengurangi kesempatan untuk mengeksplorasi konsep-konsep baru dalam kurikulum. Menurut Taba:

1. Jika ada perubahan signifikan dalam desain kurikulum yang menyeluruh, maka harus ditetapkan terlebih dahulu pola yang akan dipelajari dan diuji.
2. Komite penyusun kurikulum tradisional dapat mengembangkan rencana kurikulum yang berguna, tetapi

seringkali hanya berdasarkan logika semata, bukan pada data empiris.

3. Karena tidak ada pengujian empiris, kurikulum yang dihasilkan sering kali berupa skema yang sangat umum dan abstrak, yang sedikit membantu dalam praktik instruksional.

Ketiga masalah ini menunjukkan ketidakefisienan dalam rekayasa kurikulum tradisional dan kesenjangan antara teori dan praktik. Contoh dari disfungsi dalam teori-praktik terlihat pada kurikulum inti yang dirancang untuk (1) integrasi materi dan (2) relevansi dengan kebutuhan siswa. Namun, praktik kurikulum inti ini sering kali hanya berupa reorganisasi administratif dan pemisahan mata pelajaran tanpa menghubungkan materi dengan masalah kehidupan nyata. Rekayasa deduktif menghasilkan pemisahan antara teori dan praktik.

Sebagai alternatif, Taba mengusulkan “model terbalik” atau *inverted model*, di mana proses dimulai dengan perencanaan unit-unit pembelajaran spesifik oleh para guru, bukan dengan desain kerangka umum. Unit-unit ini kemudian diuji di kelas dan hasilnya digunakan sebagai dasar empiris untuk merancang kurikulum yang menyeluruh.

Keuntungan dari penggunaan urutan terbalik ini adalah:

1. Membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik karena unit-unit tersebut menggabungkan kemampuan teoritik dan pengalaman praktis.

2. Kurikulum yang terdiri dari unit-unit pembelajaran yang disiapkan oleh guru-guru lebih mudah diterima di sekolah dan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan kurikulum yang abstrak dan umum dari pendekatan tradisional.
3. Kurikulum yang berlandaskan pada kerangka umum dan unit-unit pembelajaran memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap praktik kelas dibandingkan dengan kurikulum yang ada.

Hilda Taba, dalam bukunya *Curriculum Development: Theory and Practice* (1962), menyajikan lima langkah berurutan dalam pengembangan kurikulum:

1. Langkah Pertama: Produksi Eksperimental Unit Pilot
Kelompok pengajar membuat unit eksperimen untuk mempelajari hubungan antara teori dan praktik. Proses ini melibatkan:
 - Diagnosa Kebutuhan: Mengidentifikasi masalah, kondisi, dan kebutuhan siswa dalam pengajaran, termasuk konteks program yang akan direvisi.
 - Merumuskan Tujuan Khusus: Menjabarkan tujuan umum berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, fokus pada unit pembelajaran.
 - Memilih Isi: Menentukan materi yang relevan dengan tujuan khusus, mempertimbangkan validitas dan signifikansi isi.

- Mengorganisasi Isi: Menyusun materi dari yang konkret ke yang abstrak dan dari yang mudah ke yang sulit.
 - Memilih Pengalaman Belajar: Mengorganisasi kegiatan yang memfasilitasi interaksi antara siswa dan materi.
 - Mengorganisasi Pengalaman Belajar: Menyusun pengalaman belajar secara terurut dan logis, berfokus pada pengembangan konsep utama.
 - Evaluasi: Menilai pencapaian tujuan unit oleh siswa untuk memperbaiki dan merevisi kurikulum.
 - Memeriksa Keseimbangan dan Urutan: Memastikan konsistensi dan keseimbangan dalam topik yang telah disusun.
2. Langkah Kedua: Pengujian Unit Eksperimen Unit pembelajaran diuji di kelas-kelas eksperimen untuk mengevaluasi validitas dan efektivitasnya dalam berbagai situasi. Hasil pengujian digunakan untuk menyempurnakan draft kurikulum.
 3. Langkah Ketiga: Revisi dan Konsolidasi Berdasarkan data dari pengujian, draft unit pembelajaran direvisi dan disempurnakan. Konsolidasi dilakukan untuk memastikan konsistensi teori, dan hasilnya adalah unit yang siap diuji lebih luas.
 4. Langkah Keempat: Pengembangan Kerangka Kurikulum Para ahli kurikulum menyusun dokumen kurikulum final yang siap untuk diimplementasikan.

5. Langkah Kelima: Instalasi dan Penyebaran Unit Baru Kurikulum yang telah dikembangkan diresmikan dan disebarluaskan ke seluruh sistem sekolah. Tahap ini melibatkan memastikan kesiapan pengajar, fasilitas, alat, dan biaya yang memadai untuk implementasi kurikulum secara optimal.

C. Model Pengembangan Kurikulum Menurut DK Wheeler

Pendekatan Wheeler dalam pengembangan kurikulum bersifat rasional dan logis, di mana setiap langkah merupakan kelanjutan dari langkah sebelumnya. Ini berarti bahwa suatu langkah tidak dapat dilaksanakan sebelum langkah-langkah sebelumnya selesai. Model pengembangan kurikulum Wheeler, yang terdiri dari lima langkah, menunjukkan perkembangan dari elemen-elemen yang diusulkan oleh Tyler dan Taba, meskipun disajikan dengan cara yang sedikit berbeda. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Menentukan maksud, tujuan, dan sasaran.
2. Memilih pengalaman belajar yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
3. Memilih materi berdasarkan tipe pengalaman yang mungkin diberikan.
4. Mengorganisasi dan mengintegrasikan pengalaman belajar serta materi dalam proses pengajaran.
5. Mengevaluasi setiap fase atau masalah terkait tujuan.

Kontribusi Wheeler terletak pada penekanan pentingnya pendekatan siklis dalam pengembangan kurikulum. Ia menyarankan bahwa proses kurikulum sebaiknya bersifat kontinu dan responsif terhadap perubahan dalam pendidikan. Pendekatan ini menyoroiti ketergantungan antar elemen kurikulum dan memastikan bahwa setiap elemen berfungsi dalam konteks yang saling berhubungan. Dalam bukunya *Curriculum Process* (1967), Wheeler berargumen bahwa pengembang kurikulum harus menggunakan proses siklis, di mana semua elemen saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Pendekatan rasionalnya mengembangkan ide-ide Tyler dan Taba dengan menekankan pentingnya langkah-langkah yang logis dan terstruktur untuk menghasilkan kurikulum yang efektif.

Langkah-langkah atau tahapan menurut Wheeler meliputi:

1. Seleksi maksud, tujuan, dan sasaran: Menentukan maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan yang ingin dicapai.
2. Seleksi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan: Memilih pengalaman belajar yang dapat membantu mencapai maksud, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Seleksi isi untuk pengalaman yang ditawarkan: Memilih materi berdasarkan jenis pengalaman yang akan diberikan.
4. Organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan materi: Mengorganisasi dan mengintegrasikan pengalaman belajar serta materi dalam konteks proses pengajaran.

5. Evaluasi setiap fase dan masalah tujuan: Mengevaluasi setiap tahap dari proses kurikulum dan menangani masalah terkait tujuan.

1

D. Model Pengembangan Kurikulum Menurut Beauchamp

Model Beauchamp (1986) menguraikan lima langkah dalam proses pengembangan kurikulum sebagai berikut:

1. Penetapan wilayah perubahan kurikulum: Menentukan area yang akan mengalami perubahan kurikulum, yang bisa meliputi tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, atau bahkan tingkat nasional. Wilayah ini ditentukan oleh otoritas pengambil kebijakan dalam pengembangan kurikulum.
2. Penetapan personalia: Menentukan pihak-pihak yang akan terlibat dalam pengembangan kurikulum, termasuk ahli pendidikan, guru berpengalaman, profesional, pustakawan, laboran, dan konsultan pendidikan. Selain itu, tokoh masyarakat, politisi, industriwan, dan pengusaha juga dapat dilibatkan. Peran dan tugas masing-masing pihak harus dirumuskan dengan jelas.
3. Penetapan organisasi dan prosedur: Mengatur proses perumusan tujuan umum (standar kompetensi) dan tujuan khusus (kompetensi dasar), pemilihan isi dan pengalaman belajar, serta evaluasi. Prosedur ini meliputi pembentukan tim pengembangan kurikulum, penilaian kurikulum yang

ada, studi tentang kurikulum baru, perumusan kriteria dan alternatif, serta penyusunan kurikulum.

4. Implementasi kurikulum: Menyiapkan segala sesuatu yang berpengaruh pada penggunaan kurikulum, termasuk pemahaman guru, fasilitas, dan manajemen sekolah.

5. Evaluasi kurikulum: Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru, desain kurikulum, keberhasilan siswa, dan keseluruhan sistem kurikulum.

Model ini melibatkan berbagai ahli dan tokoh pendidikan sesuai dengan tingkat dan luas wilayah. Di tingkat provinsi dan nasional, keterlibatan guru mungkin tidak sebesar di tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah, di mana guru memiliki peran lebih besar dalam pengembangan kurikulum. Langkah-langkah ini mencakup perumusan tujuan, pemilihan materi, pengalaman belajar, serta evaluasi dan implementasi kurikulum.

BAB IX

MACAM-MACAM KONSEP KURIKULUM

1

A. Kurikulum Akademik

Kurikulum akademik berakar dari aliran pendidikan klasik dan merupakan salah satu konsep kurikulum awal yang masih relevan hingga kini, berkat kepraktisannya dalam penyusunan dan integrasi dengan konsep kurikulum lainnya.

Pengembangan kurikulum akademik fokus pada pengetahuan dan pengembangan intelektual siswa, serta disusun oleh ahli mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya. Kurikulum ini lebih menekankan pada konten pendidikan dan bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir.

Seiring waktu, kurikulum ini tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga pada proses belajar siswa. Menurut Sukmadinata (1997), terdapat tiga pendekatan dalam pengembangan kurikulum akademik:

1. Pendekatan Struktur Pengetahuan: Siswa tidak hanya diharapkan mengingat materi, tetapi juga memperoleh dan menguji fakta dari materi yang dipelajari.
2. Pendekatan Integratif: Menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang memerlukan pengetahuan yang lebih komprehensif.
3. Pendekatan Fundamental: Pembelajaran berbasis mata pelajaran tanpa mengaitkan dengan kebutuhan praktis dalam pemecahan masalah sehari-hari.

Metode pembelajaran dalam kurikulum akademik umumnya menggunakan metode ekspositori, di mana guru menyampaikan materi secara langsung, dan metode inkuiri. Evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan tujuan mata pelajaran, contohnya: pelajaran humaniora dievaluasi dengan esai, sementara pelajaran matematika dievaluasi berdasarkan pemahaman terhadap aksioma atau teorema.

Menurut Sukmadinata (1997), pola organisasi materi pelajaran dalam kurikulum akademis meliputi:

1. Kurikulum Terkorelasi (Correlated Curriculum): Konsep-konsep dalam satu mata pelajaran dikaitkan dengan konsep-konsep dari mata pelajaran lain.
2. Kurikulum Terpadu (Unified atau Concentrated Curriculum): Materi pelajaran disusun dalam tema-tema yang mencakup berbagai disiplin ilmu.
3. Kurikulum Terintegrasi (Integrated Curriculum): Materi pelajaran digabungkan dalam suatu masalah, kegiatan, atau aspek kehidupan tertentu, tanpa memunculkan disiplin ilmu secara terpisah seperti pada kurikulum terpadu.
4. Kurikulum Pemecahan Masalah (Problem Solving Curriculum): Materi pelajaran fokus pada topik-topik yang berkaitan dengan pemecahan masalah sosial sehari-hari dengan melibatkan berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu.

1

B. Kurikulum Humanistik

Kurikulum akademik, berdasarkan pada pendekatan pendidikan pribadi, menekankan proses pembelajaran siswa daripada hasil akhir. Kurikulum ini dirancang untuk mendukung siswa dalam perjalanan pembelajaran mereka, dengan menekankan hubungan yang baik antara siswa dan guru. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai pengarah yang membantu kelancaran proses belajar siswa.

Kurikulum humanistik fokus pada perkembangan siswa sebagai individu secara keseluruhan, mencakup aspek intelektual, emosional, dan tindakan. Menurut Sanjaya (2013), kurikulum yang berorientasi pada siswa dapat dilihat dari dua sudut pandang: kehidupan sosial anak dan perspektif psikologis.

Dari perspektif kehidupan sosial, siswa dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang memerlukan pengembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Kurikulum dan pengalaman belajar dirancang untuk mendukung pengembangan siswa dalam konteks sosial mereka, tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan intelektual tetapi juga mempersiapkan mereka untuk kehidupan di masyarakat.

Dari sudut pandang psikologis, kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan emosional antara siswa dan guru. Guru diharapkan berinteraksi dengan siswa tidak hanya dari segi intelektual tetapi juga memperhatikan keseluruhan kepribadian

siswa. Hal ini bertujuan agar pendidikan dapat membentuk manusia secara utuh.

Menurut Sukmadinata (1997), kurikulum humanistik meliputi pendidikan konfluen, kritikisme radikal, dan mistisisme modern. Pendidikan konfluen berfokus pada integrasi keseluruhan pribadi siswa, yaitu respon yang menyeluruh (pikiran, perasaan, dan tindakan) terhadap lingkungan secara keseluruhan.

Pendidikan kritikisme radikal, yang berakar dari aliran naturalisme atau romantisme Rousseau, menekankan bahwa siswa harus menemukan dan mengembangkan kemampuan serta potensi mereka sendiri. Pendidikan ini bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan siswa dengan memberikan dorongan dan rangsangan tanpa adanya pemaksaan.

Pendidikan mistisisme modern fokus pada latihan dan pengembangan kepekaan emosional serta kehalusan budi pekerti. Metode yang digunakan dapat mencakup pelatihan sensitivitas, yoga, meditasi, dan sejenisnya.

Crow (Sanjaya, 2013) merekomendasikan pengembangan kurikulum dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan anak.
2. Kurikulum mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
3. Siswa dipandang sebagai subjek dalam proses belajar.
4. Pembelajaran harus sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat perkembangan siswa.

C. Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Kurikulum akademik dalam aliran pendidikan interaksional berfokus pada masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat dan mengintegrasikan upaya penyelesaiannya dalam proses pendidikan. Menurut Sukmadinata (1997), pendidikan dipandang sebagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, serta siswa dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya.

Interaksi dan kerjasama dalam pembelajaran diharapkan dapat membantu memecahkan masalah-masalah sosial yang ada. Kurikulum dirancang untuk mengidentifikasi isu-isu sosial dan merancang solusi untuk mengatasinya, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih stabil. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sosial yang berlangsung. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengembangan individu siswa tetapi juga mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan sosial yang lebih luas.

Sukmadinata (1997) menjelaskan beberapa karakteristik dari desain kurikulum rekonstruksi sosial sebagai berikut:

1. **Asumsi:** Kurikulum ini memandang bahwa tantangan atau masalah sosial di masyarakat perlu diatasi dengan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, pengetahuan alam, dan matematika. Masalah-masalah tersebut bersifat universal

1 dan harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan.

2. Masalah Sosial Mendesak: Kegiatan pembelajaran berfokus pada masalah sosial yang mendesak untuk ditangani, dengan tujuan utama adalah menangani isu-isu yang paling penting di masyarakat.

1
3. Pola Organisasi: Kurikulum dirancang seperti roda, dengan tema utama di tengah sebagai poros dan berbagai topik yang berkaitan sebagai jari-jari roda. Semua topik tersebut digabungkan untuk membentuk satu kesatuan, yang disebut sebagai velk.

Sanjaya (2013) membedakan dua perspektif dalam kurikulum rekonstruksi sosial:

1. Perspektif Status Quo: Bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Aspek-aspek penting dalam masyarakat diakomodasi dalam kurikulum melalui kajian mendalam mengenai aktivitas masyarakat.
1. Perspektif Pembaharuan: Menekankan pada pengembangan hubungan antara kurikulum dan kehidupan sosial, politik, serta ekonomi yang berkembang. Tujuannya adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi kondisi masalah sosial yang ada.

Dalam pengimplementasian kurikulum rekonstruksi sosial, Sanjaya (2013) menyarankan agar:

1. Siswa fokus pada aspek tertentu dalam masyarakat yang perlu diubah.
2. Siswa melakukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.
3. Siswa bertindak berdasarkan nilai-nilai yang relevan.

Menurut Sukmadinata (2017), tujuan dan isi kurikulum dalam model ini dapat berubah setiap tahun. Proses belajar dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan contoh kegiatan meliputi survei masyarakat, studi hubungan variabel, analisis praktek, serta evaluasi rencana perubahan dan pencapaiannya.

Dalam pendidikan reconstruksi sosial, kurikulum dirancang untuk menyelaraskan tujuan nasional dengan kebutuhan siswa. Fokus utama adalah pada penyelesaian masalah sosial sesuai dengan minat dan bakat siswa, tanpa adanya kompetisi dalam kegiatan belajar. Sebaliknya, kurikulum menekankan kerja sama, pemahaman, dan konsensus di antara siswa.

Evaluasi dalam konteks ini berorientasi pada kemampuan siswa dalam menganalisis masalah, mencari solusi, dan memiliki motivasi untuk bertindak. Evaluasi tidak hanya mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga menilai dampak kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Pendekatan reconstruksi sosial bertujuan untuk memanfaatkan potensi manusia dalam menciptakan dunia yang lebih baik di masa depan.

D. Kurikulum Teknologi

Kurikulum akademik yang berlandaskan pada aliran pendidikan teknologi mengakui pentingnya integrasi teknologi dalam pengembangan kurikulum. Dengan pesatnya kemajuan teknologi, proses pembelajaran dapat dirancang menjadi lebih efektif dan efisien. Sanjaya (2013) mengidentifikasi dua aspek utama dari pengaruh teknologi dalam kurikulum: 1) penerapan hasil teknologi dan 2) teknologi sebagai sistem.

Penerapan teknologi mencakup perencanaan yang sistematis serta penggunaan media atau alat bantu dalam pembelajaran. Penggunaan media sebagai hasil teknologi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar. Sedangkan teknologi sebagai sistem berfokus pada penerapan pendekatan sistematis dalam merancang program, dengan tujuan yang harus dicapai secara khusus. Program pembelajaran dapat berupa sistem yang didukung oleh media atau alat bantu, atau kombinasi keduanya.

Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat pada abad ke-20, kurikulum kini diarahkan pada penguasaan kompetensi tertentu. Kompetensi ini diuraikan menjadi sub-kompetensi yang lebih spesifik, akhirnya membentuk perilaku yang dapat diamati atau diukur.

Menurut Sanjaya (2013), kurikulum teknologi memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Pembelajaran dipandang sebagai respons terhadap rangsangan yang diberikan.
2. Proses belajar mengikuti serangkaian langkah dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan.
3. Pembelajaran umumnya dilakukan secara individual, meskipun dalam beberapa kasus bisa dilakukan secara kelompok.

Sanjaya (2013) juga menekankan beberapa hal penting dalam penerapan kurikulum teknologi, yaitu: 1) kesadaran akan tujuan yang ingin dicapai; 2) memberikan siswa kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktis sesuai tujuan; 3) menyediakan informasi kepada siswa tentang pencapaian mereka.

BAB X

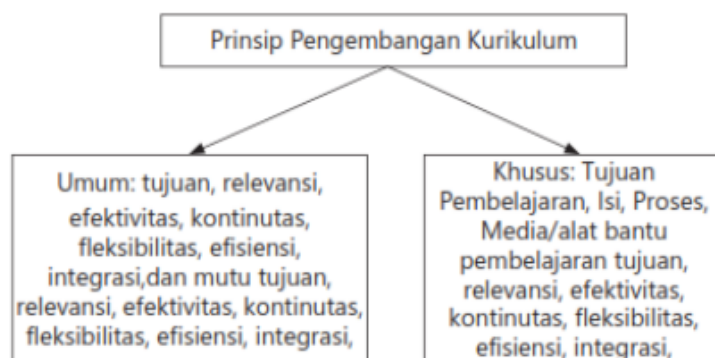
PENGEMBANGAN ¹KURIKULUM

A. Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum

Aturan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum umumnya terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang memberi arah pada kurikulum. Dalam proses pembangunan kurikulum, kita bisa memanfaatkan aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari serta menetapkan standar baru sesuai kebutuhan. Prinsip-prinsip ini dianggap fundamental dan krusial dalam proses desain kurikulum. Jenis-jenis prinsip ini berbeda berdasarkan tingkat keefektifannya, yang dapat dinilai melalui risiko yang mungkin timbul (Sudarman, 2019).

Prinsip-prinsip dasar ini dianggap sebagai panduan penting dalam desain kurikulum atau program pendidikan. Oliva (1992) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum mencakup kebenaran secara keseluruhan, kebenaran sebagian, dan dugaan, di mana tidak semua prinsip-prinsip tersebut selalu benar.

Dalam pengembangan kurikulum, pengembang harus menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman untuk memenuhi ekspektasi stakeholder pendidikan. Kurikulum yang dikembangkan diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip umum dan khusus yang diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum, sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat (2013), meliputi prinsip-prinsip ¹ berikut:

1. **Prinsip Berorientasi pada Tujuan** : Prinsip ini menekankan bahwa tujuan atau kompetensi harus menjadi arah utama dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum harus dirancang dengan jelas dan spesifik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara menyeluruh agar dapat dioperasionalisasikan dengan baik.
2. **Prinsip Relevansi** : Prinsip ini menilai sejauh mana pendidikan sesuai dengan tuntutan kehidupan. Ini mencakup:
 - Kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup siswa,
 - Kesesuaian dengan perkembangan kehidupan saat ini dan masa depan,
 - Kesesuaian dengan tuntutan dunia kerja.

Kurikulum harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan peserta didik, serta menyesuaikan dengan perkembangan

teknologi untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja dan berkontribusi pada pembangunan negara.

3. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi : Prinsip ini berhubungan dengan perencanaan pendidikan dan implementasinya. Kurikulum harus mencakup aspek-aspek utama seperti tujuan pendidikan, isi pendidikan, pengalaman belajar, dan penilaian. Efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan pembelajaran melalui kegiatan yang dilakukan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan waktu, biaya, dan sumber daya secara optimal. Efisiensi berarti perbandingan antara hasil yang dicapai dengan output yang diharapkan, di mana upaya harus dilakukan dengan menggunakan tenaga, waktu, dan biaya seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang maksimal.

4. Prinsip kontinuitas dan fleksibilitas : Kontinuitas mengacu pada upaya menjadikan setiap kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari proses yang berkelanjutan, baik secara vertikal maupun horizontal. Ini berarti bahwa perkembangan dan proses belajar anak harus berlangsung secara terus-menerus, tanpa terputus. Oleh karena itu, pengalaman belajar yang disediakan oleh kurikulum harus konsisten antara berbagai tingkat kelas dan jenjang pendidikan, serta antara pendidikan dan dunia kerja. Fleksibilitas, di sisi lain, berarti bahwa kegiatan pembelajaran harus dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal. Kurikulum

yang fleksibel harus mampu menyesuaikan dengan kondisi daerah, waktu, serta kemampuan dan latar belakang siswa, sehingga dapat mempersiapkan mereka untuk masa kini dan masa depan, serta diterapkan di berbagai tempat dan bagi siswa dengan latar belakang yang berbeda.

5. Prinsip integrasi : Prinsip ini mengacu pada keterpaduan kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan individu secara holistik dan memastikan mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan serta menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kurikulum yang efektif harus mengembangkan berbagai keterampilan hidup yang terbagi dalam lima kategori : a. Keterampilan mengenal diri sendiri (self-awareness): Kemampuan personal. b. Keterampilan berpikir rasional (thinking skills): Kemampuan untuk melakukan penalaran yang logis. c. Keterampilan sosial (social skills): Kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. d. Keterampilan akademik (academic skills): Kemampuan dalam bidang ilmiah dan pendidikan formal. e. Keterampilan vokasional (vocational skills): Kemampuan profesional dan teknis.

6. Prinsip Mutu menurut Oemar Hamalik (2017) menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus berfokus pada mutu, mencakup mutu guru, proses pembelajaran, dan media yang berkualitas.

Menurut Abdurahman an-Nahlawi dalam Majid (2006), kurikulum Islami harus memenuhi beberapa ketentuan: memiliki sistem pengajaran dan materi yang sesuai dengan fitrah manusia; mencapai tujuan pendidikan Islam; disesuaikan dengan tingkatan pendidikan (karakteristik, tingkatan pemahaman, jenis kelamin, serta tugas kemasyarakatan) yang telah dirancang dalam kurikulum; memperhatikan tujuan masyarakat yang realistis; berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan berlandaskan pada prinsip Islam yang ideal; sesuai dengan konsep Islam; realistis dan sesuai dengan tuntutan dan kondisi negara; memiliki metode yang adaptif (sesuai dengan berbagai respon sehingga cocok dengan perbedaan individu); harus efektif dalam memberikan hasil pendidikan yang bersifat perilaku dan tidak menyebabkan dampak emosional yang berlebihan pada generasi muda; sesuai dengan berbagai tingkatan usia dan perkembangan anak didik; memperhatikan pendidikan tentang perilaku aktif seperti berjihad, dakwah Islam, serta pembangunan masyarakat muslim di lingkungan sekolah, sehingga kegiatan ini dapat mewujudkan seluruh rukun Islam dan syiarnya, metode pendidikan dan pengajarannya, serta etika dalam kehidupan siswa baik secara individu maupun sosial.

Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum dalam perspektif Islam adalah sebuah sistem dan perkembangan kurikulum yang harus selaras dengan fitrah manusia, diarahkan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam, serta

memperhatikan perodesasi perkembangan peserta didik, memelihara kebutuhan masyarakat, dan merupakan organisasi kurikulum yang tidak saling bertentangan. Dalam pelaksanaan kurikulum yang realistik, perlu memilih metode yang sesuai, yaitu yang efektif untuk dilaksanakan (Asmariyani, 2014).

B. Kurikulum Berpusat Pada Bahan Ajar

Kurikulum yang berfokus pada bahan ajar atau materi yang ditawarkan kepada siswa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Hidayat (2013), ada beberapa kriteria yang dapat membantu dalam merancang kurikulum dan menentukan isi materi ajar, yaitu:

1. Isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa.
2. Isi kurikulum harus mencerminkan realitas sosial.
3. Isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Isi kurikulum harus mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

Materi kurikulum pada dasarnya adalah isi dari kurikulum itu sendiri. Oleh karena itu, materi tersebut harus mencerminkan bahan ajar yang mampu memberikan pencerahan tentang wawasan keilmuan (Yamin, 2009).

Secara umum, isi/materi kurikulum mencakup semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Logika, yaitu argumentasi nalar tentang pengetahuan benar-salah berdasarkan prosedur ilmiah.
2. Etika, yaitu pengetahuan tentang baik-buruk, nilai, dan moral.
3. Estetika, yaitu pengetahuan tentang indah-jelek yang memiliki nilai seni (Arifin, 2011).

Pengembangan materi kurikulum harus berdasarkan prinsip-prinsip berikut (Hamdi, 2017): materi harus mengandung bahan kajian yang dapat dipelajari siswa dalam pembelajaran, berorientasi pada tujuan, dan sesuai dengan hierarki tujuan pendidikan. Materi pembelajaran harus disusun secara logis dan sistematis, dalam bentuk:

1. Teori: Sekumpulan perkembangan atau gagasan, definisi, atau istilah yang saling terkait, yang memberikan penilaian metodis tentang efek samping dengan menentukan hubungan antara faktor-faktor untuk memperjelas dan meramalkan fenomena-fenomena tersebut.
2. Konsep: Ide reflektif yang terbentuk dari asosiasi tempat menarik, yang merupakan makna singkat dari kumpulan realitas.

3. Generalisasi: Tujuan keseluruhan yang bergantung pada isu eksplisit, mulai dari investigasi, penilaian, atau pembuktian dalam penelitian.
4. Prinsip: Standar pemikiran utama, contoh skema dalam materi yang menciptakan hubungan antar ide.
5. Prosedur: Strategi, khususnya perkembangan langkah-langkah berturut-turut dalam topik yang harus dilakukan oleh siswa.
6. Realitas: Berbagai data yang tidak umum dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari ungkapan, individu, lokasi, dan peristiwa.
7. Istilah: Kata-kata jargon baru dan unik yang disajikan dalam materi.
8. Model/Delineasi: Hal atau kegiatan atau proses yang diharapkan dapat menjelaskan suatu penggambaran atau penilaian.
9. Definisi: Penjelasan tentang arti penting atau signifikansi suatu hal/kata dalam konteksnya.
10. Proposisi: Kata relasional/teknik yang digunakan untuk menyampaikan topik dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan program pembelajaran.

Materi ajar adalah isi kurikulum yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang mencakup bahan kajian yang dipelajari siswa untuk mencapai tujuan setiap satuan pendidikan

dan tujuan pendidikan nasional. Bahan ajar memainkan peran penting dalam pembelajaran, dengan karakteristik yang mampu mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran.

Bahan ajar adalah sekumpulan materi yang disusun secara sistematis untuk menciptakan lingkungan belajar bagi peserta didik. Materi ini bisa berupa informasi, alat, atau teks yang disusun secara terstruktur untuk menampilkan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Bahan ajar dibutuhkan oleh pengajar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran bersama peserta didik.

Fungsi bahan ajar dalam proses pembelajaran mencakup beberapa aspek: penggunaannya oleh pendidik dan strategi pembelajaran yang diterapkan. Bagi pendidik, bahan ajar menghemat waktu dalam mengajar, mendukung peran pendidik sebagai fasilitator, meningkatkan efektivitas dan interaktivitas pembelajaran, menjadi pedoman dalam proses pembelajaran, menyediakan substansi kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, dan berfungsi sebagai alat evaluasi kompetensi pembelajaran.

Bagi siswa, bahan ajar berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran dan menyediakan substansi kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Ini membantu meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri, sesuai dengan urutan dan kecepatan masing-masing.

Menurut Prastowo (2014), berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi tiga jenis: ¹klasikal, individual, dan kelompok. Dalam pembelajaran ¹klasikal, bahan ajar berfungsi sebagai sumber informasi, pengawas, dan ¹pengendali proses pembelajaran serta sebagai bahan pendukung. Dalam pembelajaran individual, bahan ajar berfungsi sebagai media utama, mengatur dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, serta mendukung pembelajaran individual lainnya. Dalam pembelajaran kelompok, bahan ajar berfungsi sebagai sumber informasi yang terintegrasi tentang latar belakang materi, peran individu dalam kelompok, dan petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok. Bahan ajar juga berfungsi sebagai bahan pendukung ¹untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.

Pembuatan bahan ajar harus sesuai dengan tuntutan kurikulum, mempertimbangkan kebutuhan siswa (baik karakteristik maupun lingkungan sosial), membantu siswa memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks, dan memudahkan proses pembelajaran.

Kriteria seleksi isi/bahan ajar menurut Idi (2016) meliputi: validitas, signifikansi, minat (interest), kemampuan belajar (learnability), konsistensi dengan realitas sosial, dan kegunaan (utility).

Dalam pengembangan kurikulum, beberapa faktor yang perlu diperhatikan (Hamdi, 2017) adalah ruang lingkup (scope),

urutan (sequence), penempatan bahan (grade placement), dan bentuk organisasi isi. Ruang lingkup materi mencakup kedalaman dan keluasan dari keseluruhan materi, kegiatan, dan pengalaman yang akan disampaikan kepada peserta didik, menunjukkan apa yang dianggap paling penting untuk disampaikan. Urutan adalah penyusunan materi pelajaran menurut aturan dan sistematika tertentu secara berurutan, dengan prinsip dari yang mudah ke yang sulit, sederhana ke kompleks, keseluruhan ke bagian-bagian, kronologis dari dahulu ke sekarang, dan dari yang konkret ke abstrak. Penempatan adalah penyusunan isi/materi sesuai dengan tingkat perkembangan (tingkat atau kelas) tertentu. Bentuk organisasi isi adalah susunan atau bentuk pengemasan materi, seperti mata pelajaran, bidang studi, berkolerasi, atau terpadu. Setiap mata pelajaran dikembangkan menjadi beberapa pokok bahasan dan subpokok bahasan.

Kurikulum yang berpusat pada bahan ajar juga harus mempersiapkan bahan ajar dengan analisis materi pelajaran yang tepat, dan memasukkan strategi-strategi kognitif seperti advance organizer, peta konsep, chunking, metafora, dan simile. Bahan ajar ini harus disediakan tidak hanya dalam bentuk cetakan (buku/modul) tetapi juga dalam bentuk digital seperti website, CD-ROM, dan e-learning.

C. Kurikulum Mengutamakan Peranan Peserta Didik

Kurikulum adalah sistem perencanaan yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Peserta didik

merupakan individu pembelajar dengan sifat, karakteristik, dan kemampuan unik masing-masing. Pendidik dan pengembang kurikulum perlu memperhatikan dan memahami keunikan serta dinamika perkembangan peserta didik dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum. Kurikulum merupakan gabungan dari berbagai unsur psikologi, karena pendidikan berkaitan dengan perilaku manusia, dan mendidik berarti mengarahkan perilaku pembelajar menuju kedewasaan.

Menurut Oemar Hamalik (2017),¹ kurikulum dengan pendekatan berpusat pada siswa melaksanakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan, minat, kemampuan,¹ dan gaya belajar siswa, seperti belajar mandiri, belajar modul, dan paket belajar.

Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik tidak terlepas dari teori-teori psikologis yang mendasarinya, seperti teori belajar psikologi Behavioristik, psikologi Kognitif, dan psikologi Humanistik yang dijelaskan oleh Iskandar Wiryokusumo (1988):

- ¹ Teori belajar Psikologi Behavioristik berpendapat bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh penguatan dari lingkungan. Tingkah laku belajar menunjukkan hubungan erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku siswa adalah reaksi terhadap lingkungan mereka di masa lalu dan sekarang, dan bahwa semua tingkah laku adalah hasil belajar. Berdasarkan teori

ini, tingkah laku siswa dapat dianalisis dengan mempelajari latar belakang penguatan terhadap tingkah laku tersebut.

2. Teori belajar Psikologi Kognitif berpendapat bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh ganjaran dan penguatan, tetapi juga didasarkan pada kognisi. Teori ini menggambarkan bahwa tingkah laku seseorang lebih bergantung pada insight terhadap hubungan-hubungan dalam suatu situasi.

3. Teori belajar Psikologi Humanistik berpendapat bahwa setiap orang menentukan perilaku mereka sendiri dan bebas menentukan kualitas hidup mereka, tidak terikat oleh lingkungan mereka. Menurut teori ini, penyusunan dan penyajian materi pembelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa. Tujuan utama pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan diri mereka, yaitu membantu setiap individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu mereka mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka.

Dari penjelasan tersebut, pondasi psikologis dalam pengembangan kurikulum menempati posisi dan peran yang sangat penting. Karena peserta didik sebagai subjek dan sekaligus target/obyek kurikulum, pertimbangan psikologis menjadi krusial dalam perencanaan dan penyusunan kurikulum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Kurikulum yang berpusat pada peserta didik dapat dibedakan menjadi dua desain utama:

1. Activity (experience) design

- ¹ Struktur kurikulum ditentukan oleh kebutuhan dan minat peserta didik.
- Karena struktur kurikulum didasarkan pada minat dan kebutuhan peserta didik, maka kurikulum disusun bersama oleh guru dan siswa.
- Desain kurikulum ini menekankan pada prosedur pemecahan masalah.

2. Humanistic design

- Menekankan pada fungsi perkembangan peserta didik dengan fokus pada hal-hal subjektif seperti perasaan, pandangan, penjadian (becoming), penghargaan, dan pertumbuhan.
- Kurikulum humanistik berusaha mendorong pemanfaatan sumber daya dan potensi pribadi untuk memahami sesuatu melalui pemahaman mandiri, konsep sendiri, serta tanggung jawab pribadi.

D. Kurikulum Berpusat Pada Problematika Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok manusia yang bekerja sama sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas. Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, pengaruh kekuatan

sosial di masyarakat sangat berperan. Pengaruh ini memengaruhi berbagai komponen kurikulum, seperti tujuan, isi, metode/strategi, dan evaluasi.

Kurikulum mencerminkan kebudayaan masyarakat, karena kebudayaan tersebut menggambarkan proses pendidikan yang dilakukan. Kebudayaan yang berkualitas mencerminkan pendidikan yang berkualitas, sementara kebudayaan yang rendah mencerminkan pendidikan yang rendah. Realitas sosial, budaya, dan agama di masyarakat menjadi bahan studi untuk pengembangan kurikulum, sebagai dasar untuk menyusun kurikulum. Nilai-nilai dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai agama dan sosial-budaya, perlu dipertahankan dan dihormati. Nilai-nilai agama, terkait dengan kepercayaan publik terhadap ajaran agama, umumnya bersifat tahan lama.

Menurut Oemar Hamalik (2017), kurikulum yang berorientasi pada kehidupan masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan sekolah dan masyarakat dalam pembelajaran. Ini dapat dilakukan melalui metode seperti karyawisata, narasumber, kerja pengalaman, survei, proyek pengabdian/pelayanan masyarakat, berkemah, dan unit. Pengembangan kurikulum juga harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agar selaras dengan peserta didik dan mendorong mereka untuk “melek” iptek.

Kurikulum yang dikembangkan perlu dapat merespons dan mengakomodasi kebutuhan lokal, serta didasarkan pada

peningkatan sosial budaya di tingkat lokal, nasional, dan global sesuai dengan tuntutan zaman. Kurikulum harus mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, dengan tujuan agar peserta didik dapat beradaptasi dan sekaligus menciptakan pengetahuan serta inovasi yang bermanfaat dan mendukung keberadaan manusia.

BAB XI

RAGAM KONSEP KURIKULUM PESANTREN

A. Pengertian Pesantren

Istilah “pesantren” berasal dari kata “santri”. Ada juga yang menyebutkan bahwa kata “santri” mungkin berasal dari bahasa Tamil atau India, yaitu “shastri”, yang berarti guru mengaji atau orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang buku-buku agama Hindu. Ada pula yang mengatakan bahwa “pesantren” berasal dari kata “shastra”, yang berarti buku-buku suci, agama, atau ilmu pengetahuan (Kholis Thohir, 2017).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pesantren” diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau tempat belajar mengaji. Secara terminologi, pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran yang menekankan pada pelajaran dan pemahaman ilmu agama Islam, didukung oleh asrama sebagai tempat tinggal santri secara permanen (Muhammad Ismail, 2011).

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang telah berhasil melahirkan banyak ulama, dan banyak tokoh Islam merupakan lulusan dari pesantren. Prof. Mukti Ali bahkan menyatakan bahwa ulama umumnya berasal dari pesantren, bukan dari lembaga lain (Imam Syafe’i, 2017).

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren fokus pada pengajaran dan pendalaman ilmu agama. Materi yang diajarkan umumnya berupa kitab-kitab berbahasa Arab yang ditulis antara abad ke-12 dan ke-15, yang sering disebut kitab kuning (Khoirun Nisa’ & Chusnul Chotimah, 2020).

Secara umum, pondok pesantren di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis: pertama, Salafiyah (tradisional); kedua, sistem campuran (madrasah dan pondok dalam satu kompleks yang mencakup ilmu umum); dan ketiga, Modern (menggabungkan ilmu agama dan umum secara seimbang dengan manajemen modern). Namun, ketiga tipe tersebut dapat disederhanakan menjadi dua kategori utama: Salafiyah (tradisional) dan Kholaf (modern) (Khoirun Nisa' & Chusnul Chotimah, 2020).

B. Kurikulum Pondok Pesantren Tradisional

Kurikulum pondok pesantren tradisional (Salafiyah) mencakup kajian kitab kuning dengan berbagai disiplin, termasuk: Nahwu, Sharaf, Balaghah, Tauhid, Tafsir, Hadis, Mantik, Tasawwuf, bahasa Arab, Fiqih, Ushul Fiqih, Akhlak, dan lainnya (Khoirun Nisa' & Chusnul Chotimah, 2020). Kurikulum ini berfokus pada ilmu agama, seperti Teologi, Fiqih, dan Etika, dengan sedikit penekanan pada sejarah dan logika. Setiap pesantren tradisional memiliki keistimewaan dan keahlian khusus yang dipimpin oleh sang Kiyai (Abdurrahman, 2017).

Pondok pesantren tradisional tidak menerapkan sistem kelas formal; kemampuan santri dinilai berdasarkan kitab yang telah dipelajari, bukan berdasarkan kelas. Pendidikan di pesantren tradisional mengikuti penguasaan kitab, dari tingkat paling dasar hingga tingkat tertinggi, tanpa mengacu pada usia (Khoirun Nisa' & Chusnul Chotimah, 2020).

Pelaksanaan pendidikan di pesantren tradisional berlangsung 24 jam sehari dengan jadwal yang fleksibel, ditentukan oleh kesepakatan antara Kiyai dan santri sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan di pesantren ini sangat menekankan aspek etika dan moralitas, serta membina dan mengawasi tingkah laku santri agar sesuai dengan ilmu yang telah diperoleh (Sahibudin, 2017). Santri yang telah dianggap siap dan lama belajar biasanya dianjurkan untuk menerapkan ilmunya di kampung halaman setelah mendapat izin dari Kiyai.

Beberapa pondok pesantren yang masih mempertahankan kurikulum Salafiyah tradisional meliputi Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok Pesantren Langitan Tuban.

C. Kurikulum Pondok Pesantren Modern

Kurikulum Pondok Pesantren Kholafiyah (Modern) saat ini mengalami perkembangan pesat. Perubahan ini mencerminkan kemajuan dari pesantren salaf (tradisional) menuju pesantren modern yang lebih terstruktur dan terencana. Kurikulum pesantren modern tidak hanya fokus pada kajian kitab klasik, tetapi juga menggabungkan berbagai mata pelajaran dan keterampilan umum. Dengan demikian, perbedaan antara ilmu agama dan umum mulai menghilang, dan banyak pesantren kini juga menyelenggarakan pendidikan umum yang diatur oleh DIKNAS atau DEPAG (Khoirun Nisa' & Chusnul Chotimah, 2020).

Kurikulum pesantren modern merupakan kombinasi antara pendekatan tradisional dan sistem pendidikan formal, yang

bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, adaptif, dan progresif. Harapannya, santri dapat cepat menyesuaikan diri dengan perubahan peradaban dan diterima di masyarakat (Kholid Junaidi, 2016).

Sebagian besar pesantren modern telah memperbarui kurikulumnya dengan memasukkan pendidikan umum. Beberapa pesantren menerapkan proporsi seperti 30% untuk pendidikan agama dan 70% untuk pendidikan umum, sementara yang lain mungkin sebaliknya, dengan 80% untuk agama dan sisanya untuk pendidikan umum (Saparuddin Rambe, 2016).

Di pesantren modern, perubahan kurikulum mencakup berbagai bidang studi untuk mengatasi kelemahan yang ada pada pesantren salaf dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya, beberapa pesantren seperti Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta dan Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya mengintegrasikan kitab kuning ke dalam silabus mereka, meskipun jam pelajarannya berada di luar jam sekolah (Khoirun Nisa' & Chusnul Chotimah, 2020). Contoh struktur kurikulum pondok pesantren modern meliputi:

1. Bahasa Arab: Mengajarkan Al-Imla', Al-Insya', Tamrin Al-Lughah, Al-Muthalla'ah, Al-Nahwu, Al-Sharf, Al-Balaghah, Tarikh Al-Adab, dan Al-Khatt Al-Arabi.
2. Dirasah Islamiyah: Meliputi Al-Qur'an, Al-Tajwid, Al-Tauhid, Al-Tafsir, Al-Hadits, Musthalah Al-Hadits, Al-Fiqh, Ushul Fiqh, Al-Fara'id, dan Tarikh Al-Islam.

3. **Bahasa Inggris**: Termasuk **Reading and Comprehension**, **Grammar**, **Composition**, dan **Dictation**.
4. **Ilmu Pasti**: Berfokus pada matematika dan berhitung.
5. **Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)** (Muhammad Ismail, 2011).

Pondok pesantren modern, yang menggabungkan kajian kitab kuning dengan kurikulum madrasah, semakin populer di Indonesia. Orang tua banyak memilih pesantren modern untuk anak-anak mereka, berharap agar anak mereka mendapatkan keseimbangan antara ilmu agama (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan (IPTEK).

BAB XII

1 MODEL DESAIN KURIKULUM

A. Desain Kurikulum *Subject Academic*

Desain kurikulum akademik berbasis mata pelajaran didasarkan pada sistematika disiplin ilmu. Ini berarti bahwa kurikulum harus dirancang dengan mengacu pada struktur dan aturan yang ada dalam setiap disiplin ilmu. Proses pengembangan kurikulum dimulai dengan menetapkan mata pelajaran yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari disiplin ilmu tersebut tercakup dalam kurikulum.

Materi yang telah dikembangkan oleh para ahli kemudian harus diorganisasikan secara sistematis. Tujuannya adalah agar materi tersebut dapat disampaikan dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami oleh peserta didik. Organisasi materi ini juga disesuaikan dengan tujuan pendidikan dan tahap perkembangan peserta didik, untuk memastikan bahwa mereka dapat memproses informasi dengan efektif.

Desain kurikulum akademik bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang sistematis, logis, dan solid. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus dirancang agar peserta didik tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga memahami dan mengaitkan pengetahuan secara logis. Kurikulum harus menyajikan informasi secara terstruktur agar mudah dipelajari dan dipahami (Muhaimin, 2005).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendekatan terhadap desain kurikulum akademik juga mengalami perubahan. Saat ini, kurikulum tidak hanya fokus pada isi materi pelajaran, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memperhatikan cara peserta didik berinteraksi dengan materi.

Menurut Sukmadinata (2000), terdapat tiga pendekatan utama dalam pengembangan desain kurikulum akademik. Pendekatan pertama adalah pendekatan struktur pengetahuan. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya diharapkan menghafal materi, tetapi juga belajar cara memperoleh dan menguji informasi berdasarkan fakta yang ada.

Pendekatan kedua adalah studi bersifat integratif. Pendekatan ini merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan pengetahuan yang lebih komprehensif dan terpadu. Dalam pendekatan ini, kurikulum dirancang untuk menghubungkan berbagai aspek pengetahuan sehingga peserta didik dapat memahami hubungan antara berbagai bidang ilmu.

Pendekatan ketiga adalah menekankan kegiatan belajar dalam bentuk menulis, membaca, dan memecahkan masalah. Ini menunjukkan bahwa kurikulum tidak hanya berfokus pada pengajaran materi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan pengetahuan secara praktis.

Secara keseluruhan, desain kurikulum akademik harus mampu mengakomodasi berbagai pendekatan ini untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dengan memperhatikan struktur pengetahuan, integrasi materi, dan keterampilan praktis, kurikulum dapat dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik bagi peserta didik.

Pentingnya perencanaan dalam pengembangan kurikulum tidak bisa diabaikan. Tanpa perencanaan yang baik dan tepat, sulit untuk mencapai semua tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum harus dirancang dengan teliti untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari disiplin ilmu tercakup dan disampaikan dengan cara yang efektif.

Kurikulum akademik harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, kurikulum dapat memastikan bahwa peserta didik tidak hanya mendapatkan pengetahuan yang relevan, tetapi juga siap menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Penerapan desain kurikulum yang efektif memerlukan perhatian terhadap proses belajar yang berlangsung di kelas. Oleh karena itu, kurikulum harus dirancang untuk memfasilitasi proses belajar yang aktif dan dinamis, agar peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang bermanfaat untuk masa depan mereka.

1

B. Desain Kurikulum Kompetensi atau Teknologi

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang pendidikan juga mengalami perkembangan dalam teknologi pendidikan. Meskipun terdapat kesamaan dengan pendidikan klasik, seperti fokus pada isi kurikulum, teknologi pendidikan lebih menekankan pada penguasaan kompetensi daripada pengelolaan ilmu. Kompetensi yang luas dibagi menjadi kompetensi yang lebih spesifik, dan akhirnya menjadi perilaku yang dapat diukur dan diamati.

Desain kurikulum berbasis kompetensi atau teknologi dimulai dari analisis kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Muhaimin (2005) menjelaskan bahwa desain kurikulum kompetensi atau teknologi menggunakan pendekatan sistem dalam menganalisis masalah belajar, merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasinya.

Penerapan teknologi dalam pendidikan, khususnya dalam kurikulum, terbagi dalam dua kategori utama: perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Teknologi perangkat keras merujuk pada penggunaan alat-alat fisik, sedangkan teknologi perangkat lunak berkaitan dengan sistem yang mendukung pembelajaran.

Dalam praktik kurikulum, penerapan teknologi dapat dibagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, teknologi sistem, yang

berarti bahwa pembelajaran dapat disusun secara sistematis dan komprehensif tanpa harus bergantung pada alat dan media tertentu. Kedua, teknologi alat, di mana kegiatan pembelajaran didukung oleh pemanfaatan berbagai media, alat, dan fasilitas teknologi pendidikan.

Dengan teknologi sistem, kurikulum dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang terstruktur dan menyeluruh. Sementara itu, teknologi alat menyediakan dukungan tambahan melalui penggunaan media dan perangkat yang memfasilitasi proses pembelajaran.

Keduanya memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pendidikan. Teknologi sistem memastikan bahwa pembelajaran disusun dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan teknologi alat memperkaya pengalaman belajar dengan menyediakan berbagai sumber daya tambahan.

Penggunaan teknologi dalam pendidikan bertujuan untuk mengoptimalkan proses belajar dan memastikan bahwa peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Dengan demikian, teknologi pendidikan berkontribusi pada peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum dalam menghadapi tantangan zaman.

1

C. Desain Kurikulum Humanistik

Desain kurikulum humanistik berfokus pada upaya memanusiaikan manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan

lingkungan yang memungkinkan individu menjadi lebih humanis dan meningkatkan harkat serta ¹ martabat manusia. Kurikulum ini menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan kekuatan untuk berkembang, sehingga kurikulum tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan intelektual, tetapi juga pada aspek sosial dan afektif seperti emosi, sikap, dan nilai.

Dalam konteks evaluasi, kurikulum humanistik lebih memprioritaskan proses belajar daripada hasil akhir. Ini mencerminkan dasar filosofis, teori, evaluasi, dan pengembangan program pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai humanisme (Muhaimin, 2005).

Menurut Sukmadinata (2000), kurikulum humanistik memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, kurikulum ini menekankan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Kedua, integrasi yang terjadi melalui partisipasi mendorong interaksi antar peserta didik. Ketiga, konten kurikulum relevan dengan kebutuhan, minat, dan kepentingan peserta didik, disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Keempat, kurikulum ini memberikan perhatian ¹ utama pada pengembangan kepribadian peserta didik. Terakhir, kurikulum humanistik bertujuan untuk mengembangkan pribadi peserta didik secara menyeluruh dan harmonis, baik dalam diri mereka sendiri maupun dalam hubungan dengan lingkungan sekitar.

1

D. Desain Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Desain kurikulum rekonstruksi sosial berfokus pada masalah yang dihadapi masyarakat. Menurut Sukmadinata (2000), kurikulum ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan ilmu dan teknologi, serta mendorong kerjasama untuk menyusun solusi atas berbagai masalah sosial, dengan harapan menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Selain menekankan konten pembelajaran, kurikulum rekonstruksi sosial juga memprioritaskan proses pendidikan dan pengalaman belajar. Kurikulum ini menganggap manusia sebagai makhluk sosial yang bergantung pada interaksi dan kerjasama dengan orang lain dalam kehidupannya.

Dalam pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga melibatkan kegiatan bersama, kolaborasi, dan interaksi dengan lingkungan. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah memperkenalkan peserta didik pada tantangan, hambatan, dan masalah yang dihadapi masyarakat, serta merumuskan dan mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut.

Masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat merupakan bagian dari kajian ilmu sosial dan harus dihubungkan dengan berbagai disiplin ilmu lainnya seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, budaya, estetika, bahkan ilmu alam dan matematika.

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai desain kurikulum, peneliti lebih cenderung mengacu pada desain kurikulum rekonstruksi sosial. Hal ini disebabkan oleh fokus desain ini yang diarahkan untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan sosial masyarakat. Selain itu, kurikulum rekonstruksi sosial tidak hanya menekankan pada konten kurikulum, tetapi juga pada proses penyampaian pengalaman belajar.

BAB XIII

¹EVALUASI KURIKULUM

A. Pengertian Evaluasi Kurikulum

Evaluasi adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dalam pendidikan, evaluasi berarti proses ¹ mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan terkait perlu tidaknya perbaikan sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tyler, sebagaimana dikutip oleh Sukmadinata, menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah tercapai atau terrealisasikan.

Kurikulum adalah rencana yang dibuat untuk membimbing anak belajar di sekolah, disajikan dalam bentuk dokumen yang telah ditentukan, disusun berdasarkan tingkat generalisasi tertentu, dapat diaktualisasikan dalam kelas, dapat diamati oleh pihak berkepentingan, dan dapat membawa perubahan perilaku.

Evaluasi dan kurikulum adalah dua disiplin yang memiliki hubungan sebab-akibat, bersifat organik, dan berproses secara ¹ evolusioner. Evaluasi merupakan kegiatan yang luas, kompleks, dan terus menerus untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Berikut adalah pembagiannya :

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu

(Pasal 1 Butir 19 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di bidang Kesehatan).
3. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi (Pasal 1 Butir 6 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa).
4. Menurut Grayson (1978), kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran (outcomes) yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Materi dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran (goals) dan tujuan (objectives) pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

5. Menurut Harsono (2005), kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti trek atau jalur pacu. Saat ini, definisi kurikulum semakin berkembang sehingga mencakup seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan.

B. Peranan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum memiliki peran penting baik dalam penentuan kebijakan pendidikan secara umum maupun dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum. Hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan pendidikan dan pengembang kurikulum untuk memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan model kurikulum yang digunakan. Selain itu, hasil evaluasi kurikulum juga bermanfaat bagi guru, kepala sekolah, dan pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, metode, alat bantu pembelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya.

Beberapa hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan pendidikan dan kurikulum mencakup guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, dan pengembang kurikulum. Namun, setiap pengambil keputusan

dalam proses evaluasi memiliki peran yang berbeda sesuai dengan posisinya.

Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam penggunaan hasil evaluasi untuk pengambilan keputusan adalah bahwa hasil evaluasi yang diterima oleh berbagai pihak adalah sama. Masalah yang muncul adalah apakah hasil evaluasi tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak. Jawabannya belum tentu, karena suatu informasi mungkin lebih bermanfaat bagi pihak tertentu tetapi kurang bermanfaat bagi pihak lainnya.

Kesatuan dalam penilaian hanya dapat dicapai melalui konsensus, yang berupa kerangka kerja penelitian yang difokuskan pada tujuan-tujuan khusus, pengukuran prestasi belajar yang bersifat perilaku, dan analisis statistik dari hasil tes post-tes. Secara umum, langkah-langkah pokok evaluasi pendidikan meliputi tiga kegiatan utama yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil. Peran evaluasi kurikulum dalam pendidikan mencakup tiga aspek berikut:

1. Evaluasi sebagai penilaian moral.
2. Evaluasi yang berfokus pada masalah nilai.
3. Evaluasi dan pengambilan keputusan.
4. Evaluasi dan konsensus nilai.

Kesatuan penilaian dapat dicapai melalui konsensus, yang mencakup kerangka kerja penelitian yang berfokus pada tujuan-tujuan khusus, pengukuran prestasi belajar yang bersifat perilaku,

serta analisis statistik dari hasil tes dan post-tes. Terdapat dua kriteria dalam penilaian kurikulum:

1. Kriteria berdasarkan tujuan yang telah ditentukan atau sering disebut kriteria patokan.
2. Kriteria berdasarkan norma-norma atau standar yang ingin dicapai sebagaimana adanya.

Berdasarkan konsep dan kriteria kurikulum di atas, peran kurikulum terbagi menjadi tiga:

3. Peran ¹ **Konservatif**: Menekankan bahwa kurikulum dapat menjadi sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang masih relevan dengan masa kini kepada generasi penerus.
4. Peran **Kreatif**: Mengakui bahwa **perkembangan ilmu** pengetahuan dan aspek-aspek lainnya terjadi setiap saat, sehingga kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru dan membantu setiap peserta didik mengembangkan potensinya.
5. Peran Kritis dan Evaluatif: Didukung oleh kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya dalam masyarakat selalu berubah, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada peserta didik perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

C. Aspek Kurikulum yang Dinilai

Menurut Arich Lewy (1997), aspek-aspek yang harus dievaluasi sesuai dengan tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi ini bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai penelitian. Aspek-aspek tersebut meliputi:

1. Penentuan Tujuan Umum

Tujuan kurikulum terkait erat dengan nilai-nilai, aliran-aliran, dan kekuatan dalam masyarakat. Seringkali, tujuan umum pendidikan ditentukan oleh pemerintah. Evaluasi tujuan ini memerlukan bantuan ahli sosiologi, ekonomi, antropologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya yang dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang kecenderungan demografi, kebutuhan tenaga kerja, perubahan ekonomi, dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Mereka menggunakan data statistik dari pemerintah. Oleh karena itu, yang perlu dinilai adalah apakah tujuan kurikulum telah sesuai dengan nilai-nilai bangsa, politik pemerintah dalam pembangunan negara, perkembangan zaman, aspirasi masyarakat, serta kebutuhan anak dalam menghadapi masa depannya.

2. Perencanaan

Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan harus diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan kurikuler yang lebih terperinci dalam bentuk mata pelajaran, bahan tertentu, dan proses belajar. Tim pengembang kurikulum

harus mulai menulis satuan-satuan pelajaran, memikirkan alat-alat pengajaran, kegiatan-kegiatan belajar siswa, sarana dan prasarana, serta proses belajar mengajar yang paling sesuai. Kurikulum harus diperhatikan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelum pengembangan kurikulum, harus ada perencanaan terhadap bagian-bagian kurikulum agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

3. Uji Coba dan Revisi

Kurikulum sering kali dibuat di belakang meja tulis dan diimplementasikan setelah mendapatkan persetujuan resmi dari pihak berwenang. Oleh karena itu, kurikulum bisa dikatakan subjektif. Namun, jika diharapkan agar setiap anak belajar dalam kewajiban belajar sampai usia 12, 15, atau 18 tahun, maka penyusunan kurikulum yang sesuai bagi siswa dengan latar belakang sosial, bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda tidak bisa diselesaikan secara subjektif saja. Uji coba dan revisi diperlukan untuk memastikan kurikulum benar-benar sesuai dan efektif.

Mempertimbangkan bahwa pendidikan berlangsung dalam masyarakat yang dinamis dan dunia yang kompleks, pengembangan kurikulum harus dilakukan secara ilmiah dengan mengumpulkan data empiris melalui pengamatan dan eksperimentasi. Setiap pembaruan kurikulum sebaiknya melalui tahap uji coba dengan sampel terbatas untuk

mengidentifikasi kelemahan yang perlu direvisi. Untuk ini, berbagai alat tes formatif diperlukan, selain mengobservasi proses belajar-mengajar baik di dalam maupun di luar kelas yang dituangkan dalam bentuk laporan. Pendapat dan penilaian siswa tentang pengalaman belajar mereka dengan kurikulum baru, serta masukan dari guru, ahli bidang disiplin ilmu, psikolog, dan pendidik juga sangat berharga.

Berdasarkan hasil uji coba, dilakukan revisi dan perubahan program pelajaran yang kemudian diuji cobakan kembali.

1 4. Uji Lapangan

Setelah program dianggap cukup mantap berdasarkan uji coba, tiba waktunya untuk melaksanakannya dengan sampel acak yang lebih luas untuk menciptakan situasi yang menyerupai kondisi lapangan sebenarnya. Jika uji coba bertujuan menemukan kelemahan program, maka uji lapangan mempelajari kondisi-kondisi di mana kurikulum dapat dijalankan dengan baik. Hal ini mencakup kesiapan tenaga pengajar, administrasi, murid, keadaan dan lokasi sekolah (di kota atau pedesaan), ukuran sekolah, fasilitas, keadaan sosial-ekonomi, dan sebagainya. Semakin besar heterogenitas populasi sekolah, semakin besar pula sampel yang diperlukan.

5. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum baru harus disertai dengan berbagai perubahan lainnya, seperti pendidikan guru (pra-jabatan

dan dalam-jabatan), metode mengajar, buku pelajaran, serta alat-alat instruksional lainnya. Jika materi pelajaran baru, seperti matematika modern, maka guru perlu mendapat pelatihan sehingga mereka dapat mengajarkan pelajaran tersebut kepada siswa dengan baik dan profesional.

1 Dalam pelaksanaan kurikulum baru, diperlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk komite pendidikan, kepala sekolah, guru, serta orang tua dan masyarakat umum. Salah satu aspek penting yang sering kurang diperhatikan adalah sistem ujian lokal maupun nasional. Sistem ujian harus disesuaikan dengan kurikulum. Misalnya, kurikulum yang mengutamakan proses tidak akan berhasil dengan baik jika evaluasi hanya menekankan hasil berupa fakta, informasi, dan pengetahuan yang terpisah-pisah.

D. Model-Model Evaluasi Kurikulum

1. Evaluasi Model Penelitian

Model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan pada teori dan metode tes psikologis serta eksperimen lapangan. Tes psikologis atau tes psikometrik umumnya memiliki dua bentuk: tes intelegensi yang mengukur kemampuan bawaan, dan tes hasil belajar yang mengukur perilaku skolastik.

Eksperimen lapangan dalam pendidikan dimulai tahun 1990, menggunakan metode yang biasa digunakan

dalam penelitian botani pertanian. Ahli botani pertanian melakukan percobaan untuk mengetahui produktivitas berbagai macam benih dengan menanamnya di petak-petak tanah yang memiliki kesuburan dan kondisi lain yang serupa. Dari percobaan tersebut, dapat diketahui benih mana yang paling produktif. Percobaan serupa dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh tanah, pupuk, dan faktor lainnya terhadap produktivitas suatu jenis benih.

Model eksperimen dalam botani pertanian ini dapat diterapkan dalam pendidikan, di mana anak-anak dapat disamakan dengan benih, sedangkan kurikulum serta berbagai fasilitas dan sistem sekolah dapat disamakan dengan tanah dan perawatannya. Untuk mengetahui tingkat kesuburan benih (anak) serta hasil yang dicapai pada akhir program percobaan, dapat digunakan tes (pre-test dan post-test).

Pendekatan Komparatif dalam Evaluasi: Salah satu pendekatan dalam evaluasi yang menggunakan eksperimen lapangan adalah melakukan perbandingan antara dua kelompok anak dengan menggunakan dua metode belajar yang berbeda. Misalnya, kelompok pertama belajar membaca dengan metode global, dan kelompok lainnya menggunakan metode unsur. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kelompok mana yang lebih baik atau lebih berhasil dan apakah keberhasilan metode tersebut dapat diterapkan

pada metode lain. Rancangan penelitian ini membutuhkan persiapan yang sangat teliti dan rinci, termasuk ukuran sampel, variabel yang terkontrol, hipotesis, perlakuan, tes hasil belajar, dan lain-lain, yang perlu dirumuskan secara tepat dan rinci.

Ada beberapa kesulitan yang dihadapi dalam eksperimen tersebut. Pertama, kesulitan administratif, karena sangat sedikit sekolah yang bersedia dijadikan sekolah eksperimen. Kedua, kesulitan teknis dan logis, yaitu tantangan dalam menciptakan kondisi kelas yang seragam untuk kelompok-kelompok yang diuji. Ketiga, sulit untuk mencampurkan guru yang mengajar pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, karena pengaruh dari guru-guru tersebut sulit dikontrol. Keempat, ada keterbatasan dalam manipulasi eksperimen yang dapat dilakukan. Dalam botani pertanian dengan rancangan yang sangat sempurna, eksperimen dapat dimanipulasi hingga 25 perlakuan (treatment), tetapi dalam penelitian pendidikan tidak mungkin melakukan perlakuan sebanyak itu.

1 2. Evaluasi Model Objektif

Evaluasi model objektif (model tujuan) berasal dari Amerika Serikat dan berbeda dengan model komparatif dalam dua hal. Pertama, dalam model objektif, evaluasi merupakan bagian integral dari proses pengembangan kurikulum. Para evaluator memainkan peran penting dalam mengumpulkan

pendapat-pendapat dari luar tentang inovasi kurikulum yang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan pada akhir pengembangan kurikulum dan disebut evaluasi sumatif. Dalam beberapa kasus, ¹evaluator bekerja sebagai bagian dari tim pengembang, dan informasi yang diperoleh dari penilaian ini digunakan untuk memperbaiki inovasi yang sedang berjalan, yang dikenal sebagai ¹evaluasi formatif.

Kedua, kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur berdasarkan seperangkat tujuan khusus. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur dari sejauh mana siswa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pengembang kurikulum yang menggunakan model objektif ini menggunakan standar pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Tujuan dari pendekatan komparatif adalah menilai apakah kegiatan yang dilakukan kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol, sehingga kedua kelompok harus ekuivalen. Namun, dalam model objektif, kesetaraan antara kelompok tidak menjadi masalah.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tim pengembang model objektif:

- a. Ada kesepakatan tentang tujuan-tujuan kurikulum,
- b. Merumuskan tujuan-tujuan tersebut dalam bentuk tindakan siswa,
- c. Menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut,

d. Mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan.

Pendekatan ini digunakan oleh Ralph Taylor (1930) dalam menyusun tes dengan titik tolak pada perumusan tujuan tes, yang menjadi asal mula pendekatan sistem (system approach). Pada tahun 1950-an, Benjamin S. Bloom dan rekan-rekannya menyusun klasifikasi sistem tujuan yang mencakup area-area belajar (cognitive domain). Mereka membagi proses mental yang berhubungan dengan belajar tersebut dalam enam kategori: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Mereka juga membagi tujuan-tujuan tersebut menjadi sub-tujuan yang lebih spesifik. Namun, perumusan tujuan-tujuan dari Bloom dan rekan-rekannya belum sampai pada perumusan tujuan yang bersifat perilaku, sehingga diperlukan perumusan lebih lanjut yang sangat khusus dan bersifat perilaku.

Dasar-dasar teori Tyler dan Bloom menjadi prinsip sentral dalam berbagai rancangan kurikulum, yang mencapai puncaknya dalam sistem belajar berprogram dan sistem instruksional. Salah satu sistem pengajaran terkenal adalah IPI (Individually Prescribed Instruction), sebuah program yang dikembangkan oleh Learning Research and Development Centre Universitas Pittsburgh. Dalam IPI, siswa mengikuti kurikulum yang memiliki tujuh unsur:

- a. Tujuan-tujuan pengajaran yang disusun dalam area-area, tingkatan-tingkatan, dan unit-unit.
- b. Prosedur program testing.
- c. Pedoman prosedur penulisan.
- d. Materi dan alat-alat pengajaran.
- e. Kegiatan guru di kelas.
- f. Kegiatan murid di kelas.
- g. Prosedur pengelolaan kelas.

Tes untuk mengukur prestasi belajar siswa merupakan bagian integral dari kurikulum. Setiap butir tes terkait dengan keterampilan, unit, atau tingkat tertentu dari tujuan khusus. Untuk mengikuti program pendidikan, siswa harus terlebih dahulu mengambil tes penempatan untuk menentukan di mana mereka harus mulai belajar. Kemajuan siswa dimonitor oleh guru dengan memberikan tes yang mengukur tingkat penguasaan tujuan-tujuan khusus melalui pre-test dan post-test. Siswa dianggap menguasai suatu unit jika memperoleh skor minimal 80. Jika ini sudah dikuasai, berarti penguasaan siswa sudah sesuai dengan kriteria.

3. Model Campuran Multivariasi

Evaluasi model perbandingan (comparative approach) bersama dengan model Tyler dan Bloom menghasilkan model evaluasi campuran multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Strategi ini memungkinkan perbandingan antara

beberapa kurikulum dan secara bersamaan mengukur keberhasilan masing-masing kurikulum berdasarkan kriteria khusus yang relevan.

Mirip dengan ¹ eksperimen lapangan serta usaha awal dari Tyler dan Bloom, metode ini juga terpisah dari proyek evaluasi yang lebih awal. Metode-metode ini mulai diterapkan dalam ¹ bidang kurikulum setelah perkembangan komputer dan program paket pada tahun 1960-an. Program paket berisi program statistik sederhana yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang komputer untuk penggunaannya. Dengan kemajuan penggunaan komputer, studi lapangan tidak lagi terhambat oleh kesalahan dan keterlambatan, karena semua masalah pengolahan statistik dapat dikerjakan menggunakan komputer.

Langkah-langkah dalam model multivariasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mencari sekolah yang berminat untuk dievaluasi atau diteliti,
- b. Melaksanakan program, dengan fokus pada partisipasi optimal jika tidak ada pencampuran sekolah,
- c. Menyusun tujuan yang mencakup semua tujuan pengajaran, seperti metode global dan metode unsur, dan menyiapkan tes tambahan jika diperlukan,
- d. Setelah semua informasi terkumpul, mulai proses analisis menggunakan komputer,

¹ e. Tipe analisis ini juga dapat digunakan untuk mengukur pengaruh gabungan dari berbagai variabel yang berbeda.

Beberapa kesulitan muncul dalam penggunaan model campuran multivariansi. Pertama, untuk memperoleh hasil tes statistik yang signifikan, diperlukan 100 kelas dengan 10 pengukuran masing-masing, yang lebih memungkinkan dibandingkan dengan 10 kelas dengan 10 pengukuran. Oleh karena itu, model multivariansi ini lebih cocok untuk evaluasi kurikulum skala besar. Kesulitan kedua adalah banyaknya variabel yang perlu dihitung secara bersamaan; komputer hanya dapat menangani hingga 40 variabel, sementara model ini bisa menghasilkan hingga ¹300 variabel. Kesulitan ketiga adalah meskipun model multivariansi dapat mengurangi masalah kontrol dalam eksperimen lapangan, tetap ada tantangan dalam hal perbandingan.

Model-model evaluasi kurikulum ini berkembang untuk mengevaluasi berbagai model atau pendekatan kurikulum tertentu. Model perbandingan lebih cocok untuk evaluasi kurikulum yang fokus pada konten (Content-based curriculum). Model tujuan lebih sesuai untuk kurikulum yang berbasis tujuan (Goal-based curriculum). Sedangkan model campuran dapat digunakan untuk mengevaluasi kurikulum yang berfokus pada isi, tujuan, maupun situasi (Situation-based curriculum).

BAB XIV

PENUTUP

Kurikulum Pendidikan Islam merupakan kerangka sistematis yang dirancang untuk mengintegrasikan ajaran Islam dalam proses pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dalam konteks syariat. Kurikulum ini tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga aspek moral dan spiritual, yang menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan Islam.

Pada umumnya, kurikulum pendidikan Islam terdiri dari beberapa komponen utama. Tujuan pendidikan yang jelas, yaitu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga baik akhlaknya, taat beribadah, dan mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini mencakup aspek pembentukan iman, taqwa, serta keterampilan hidup yang relevan dengan ajaran Islam.

Materi kurikulum yang mencakup berbagai bidang studi, seperti Al-Qur'an, Hadis, Fiqh, Akidah, dan sejarah Islam. Materi ini disusun dengan mengacu pada sumber-sumber Islam yang sah dan relevan, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dalam pendidikan Islam, materi tidak hanya ditujukan untuk pengetahuan semata, tetapi juga untuk praktik kehidupan yang sesuai dengan syariat.

Metode pengajaran dalam kurikulum pendidikan Islam. Metode ini melibatkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pendidikan sekuler. Pendekatan ini meliputi pembelajaran

yang bersifat dialogis, berbasis pengalaman, serta integrasi antara teori dan praktik. Pengajaran dilakukan dengan memperhatikan konteks keagamaan dan budaya peserta didik, serta mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

Penilaian dan evaluasi dalam kurikulum pendidikan Islam. Evaluasi tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga dimensi spiritual dan moral. Penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami dan menerapkan ajaran Islam, serta perkembangan karakter mereka. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan holistik, untuk memastikan bahwa semua aspek perkembangan peserta didik terpantau dengan baik.

Integrasi antara pendidikan formal dan non-formal. Kurikulum pendidikan Islam biasanya mengintegrasikan pendidikan formal di sekolah dengan pendidikan non-formal di luar sekolah, seperti di masjid atau lembaga pendidikan Islam lainnya. Ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara pembelajaran di kelas dengan praktik keagamaan di kehidupan sehari-hari.

Peran serta keluarga dan masyarakat dalam kurikulum pendidikan Islam. Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung dan memperkuat pendidikan Islam. Mereka diharapkan untuk terlibat dalam proses pendidikan dengan memberikan dukungan moral, fasilitas, serta keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Kurikulum pendidikan Islam sering disesuaikan dengan konteks lokal. Di berbagai negara atau daerah, kurikulum pendidikan Islam mungkin mengalami penyesuaian untuk mengakomodasi perbedaan budaya dan tradisi lokal, sementara tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Penyesuaian ini bertujuan agar kurikulum lebih relevan dan efektif dalam konteks lokal.

Penekanan pada nilai-nilai akhlak. Kurikulum pendidikan Islam menekankan pentingnya pembentukan akhlak yang baik, seperti jujur, amanah, dan rendah hati. Pendidikan akhlak dianggap sebagai inti dari kurikulum, karena akhlak yang baik merupakan refleksi dari pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang benar.

Pengembangan keterampilan hidup. Selain materi keagamaan, kurikulum pendidikan Islam juga mencakup pengembangan keterampilan hidup yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk keterampilan sosial, kepemimpinan, serta keterampilan praktis lainnya yang mendukung peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan berkontribusi positif kepada masyarakat.

Adaptasi dengan perkembangan teknologi. Kurikulum pendidikan Islam modern sering kali mengadopsi teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu dalam menyampaikan materi ajaran Islam dengan lebih efektif, serta memperluas akses pendidikan kepada peserta didik.

Pengembangan kurikulum yang berbasis pada riset. Untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan Islam tetap relevan dan efektif, pengembang kurikulum melakukan riset dan evaluasi secara berkala. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, serta mengevaluasi efektivitas metode dan materi yang digunakan dalam kurikulum.

Keterlibatan dalam pendidikan global. Kurikulum pendidikan Islam juga berusaha untuk mengaitkan ajaran Islam dengan perspektif global. Ini termasuk pemahaman terhadap isu-isu global, kerjasama internasional, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks global. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat berperan dalam masyarakat global dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Farida Herna Astuti, 2018. "Analisis Pengembangan Kurikulum Model Beachamp di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam", Jurnal Realita, 3/5 (April 2018)
- Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati. 2001. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahid, N. 2006. Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan. Jurnal Islamica, 1(1), 12-
- Alamsyah, dkk. 2011. Buku Ajar Pengembangan Kurikulum. Surabaya: Kopertais IV Press.
- Andayani, W. S. dan D. 2012. Komponen-Komponen Pengembangan Kurikulum. In Kurikulum & Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Press.
- Andita, Dyah. 2012. "Model-Model Pengembangan Kurikulum". Tersedia pada <http://dyahandita.blogspot.com/2012/04/1.html>

- Ansyar, Mohd. dan H. Nurtain. 1992. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum. Jakarta: P2TK Ditjendikti Depdikbud.
- Arifai, Ahmad. 2018. Pengembangan Kurikulum Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Vol.3, No. 2, Desember 2018
- Arifin, Z. 2011. Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Arifin, Zainal, 2012. Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam, Yogyakarta: Diva Press,.
- Arifin, Zainal. 2011. Komponen dan Organisasi Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Asmariansi. 2014. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Dalam Perspektif Islam. *Jurnal AL-AFKAR*, 3(2), 66.
- Asri, M. 2017. Dinamika kurikulum di Indonesia. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2), 192–202.
- Azra, A. 1999. Pendidikan Islam: Tradisi Modernisasi Menuju Milenium Baru. PT. Logos Wacana Ilmu.
- Baharun, H. 2017. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan dan LangkahLangkah Pengembangan Kurikulum PAI). Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
- Cahyana, O. A. 2008. Kinerja kepala sekolah di era globalisasi. *Jurnal Teknodik*, XII(2), 33–46.

- Dakin. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Daulay, H. P. 2007. *Pendidikan Islam: Dalam System Pendidikan Nasional di Indonesia*. Kencana.
- Daulay, H. P. 2012. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Dhaifi, A. 2017. Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 76–88.
- Didiyanto, 2017. Paradigma Pengembangan Kurikulum PAI di Lembaga Pendidikan, *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017
- Ditjen Pendidikan Islam. (n.d.). *Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi*. Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Retrieved February 26, 2021, from <http://www.pendis.kemenag.go.id/new/sejarah-pendidikan-islamdan-organisasi-ditjen-pendidikanislam/>
- Djamarah & Syaiful Bahri. 2000. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzan. 2017. *Kurikulum & Pembelajaran*. Tangerang: GP Press.
- Fauzi, A. 2009. Strategi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Studi Komparatif di Universitas Muhammadiyah

Malang dan Universitas Islam Malang. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Fauzi, A. 2017a. Building Transformative Management Epistemology at Pondok Pesantren Based on Local Wisdom: In Proceedings of The 1 st International Conference on Education and Islamic Culture “Rethinking Islamic Education Toward Cultural Transformation” Faculty of Tarbiyah. Islamic Institute of Nurul Jadid Probolinggo (pp. 199-203).

Hamalik, O. 2008. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi aksara.

Hamdi, M. M. 2017. Konsep Pengembangan Kurikulum. INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(1).

Hamid Syarief. 2002. Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hidayat Tatang, 2019. “Model Pengembangan Kurikulum Tyler dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah”, Potensi: Jurnal Kependidikan Islam, 5/1 (Juli-Desember 2019).

Hidayat, S. 2013. Pengembangan Kurikulum Baru. Jogjakarta: PT Remaja Rosda Karya.

Hitami & Munzir. 2004. Mengkonsep Kembali Pendidikan Islam. Yogyakarta: Infnite Press.

- Idi Abdullah, 1999. pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Jakarta: Gaya Media,
- Idi, A. 2016. Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik (1st ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Idi, Abdullah. 2011. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. Yogyakarta: Ar Ruz Media.
- Irsyad, Muhammad. 2016. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah, *Iqra'*, Vol. 2, No. 1, November
- Iskandar Wiryokusumo, dan U. M. 1988. Dasar-dasar Pengembangan Kurikum. Jakarta: Bina Aksara.
- Juahab, J. 2019. Peran dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dan Guru Dalam Pengembangan Kurikulum. *Bada'a: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 1(1), 23–30. <https://doi.org/10.37216/badaa.v1i1.241>
- Khuzaimah, 2017. Paradigma Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Analisis Berbagai Kritik terhadap PAI), *Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, Mei 2017
- Kuntowijoyo. 2002. Radikalisasi Petani. Jakarta : Bentar Budaya.
- Langgulung, Hasan. 1988. Asas-asas Pendidikan Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Majid, A. 2006. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Mudhofir Ali, 2011. Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Rajagrafindo,
- Muhaimin dan Mujib, Abdul. 1993. Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya. Bandung: Trigenda Karya.
- Muhaimin, 2019. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, Depok: PT Raja Grafindo Persada,
- Muhaimin. 2003. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan PSAPM, Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat Surabaya.
- Muhaimin. 2005. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.
- Muin Arifah, 2014. Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter (PGSD UNNES), PT Raja Grafindo Persada,
- Mukhtar, M. 1999. Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya. Logos. Jakarta : Bentar Budaya.
- Nahrawi, A. 2008. Pembaharuan Pendidikan Pesantren. Jakarta : Gama Media.
- Nana Sudjana. 1988. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Jakarta: Sinarbaru Algesindo.

- Nana Syaodih Sukmadinata. 2001. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu, D. S. 2018. Dinamika Madrasah Sebelum Indonesia Merdeka. Jakarta: ITTIHAD
- Ngalim Purwanto. 1995. Ilmu Pendidikan Teori dan Praktis. Bandung: Rosdakarya.
- Ni'mah, Lilis Lutviyatun. 2020. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama di Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri, Vol. 3, November 2020.
- Nizar, Samsul. 2002. Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis. Jakarta: Quantum Teaching.
- Nurhayati, A. 2013. Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Implikasinya terhadap Dunia Pendidikan Islam. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 133–144.
- Nurlaeli, Acep. 2020. Inovasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah dalam Menghadapi Era Milenial, *Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pascasarjana PAI Unsika*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2020
- Oemar Hamalik, 2013. Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Oemar Hamalik. 2017. Kurikulum dan pembelajaran (1st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.

Oliva, P. F. 1992. *Developing Curriculum*. New York: Harper Collin Publisher.

Permendikbud. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. http://lppks.kemdikbud.go.id/uploads/pengumuman/1526355089Permendikbud_Nomor6_Tahun2018.pdf

Ramayulis, 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Penerbit Kalam Mulia.

Sabarudin, M. 2015. Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan. *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(1), 139–174.

Sanjaya, W. 2010. *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sanjaya, Wina. 2009. *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum KTSP*. Jakarta: Kencana Prenada.

Sanjaya,W. 2013. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Steenbrink, K. A. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

- Sudarman. 2019. Pengembangan Kurikulum: Kajian Teori dan Praktik. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Sugiana, Aset. 2019. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Implementasinya di MTs Nurul Ummah Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XVI, No. 1, Juni 2019
- Sukmadinata Nana Syaodih, 2012. Pengantar Kurikulum Teori dan Praktek, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Sukmadinata. 1997. Nana Syaodih. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Susilana, Rudi dkk. 2006. Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung: Jurusan Kutekpen FIP UPI.
- Suyanto dan Djihad Hisyam. 2000. Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III. Jakarta: Adicita Karya Nusa.
- Tim MEDP. 2008. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Wahidmurni. 2010. Pengembangan Kurikulum IPS & Ekonomi di Sekolah/Madrasah. Malang: uin maliki press.
- Wahyuni, F. 2015. Kurikulum dari masa ke masa. Jurnal, AlAdabiya, 10(2).
- Yamin, M. 2009. Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan; Panduan Menciptakan Manajemen Mutu Pendidikan

Berbasis Kurikulum yang Progresif dan Inspiratif. Yogyakarta:
Diva Press.

Yunus, M. 1992. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta:
Hidakarya Agung

PROFIL PENULIS



Akib, Penulis lahir di Onembute, Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, 28 Juli 1969, Istri bernama Rosmini Adi Andi S.Ag. Anak pertama Muhammad Ade Qamaruddin, S.Kom Anak kedua Muhammad Adil Abdullah Akib. Anak ketiga Muhammad

Al Amin Akib dan Anak keempat Talitha Latifah Akib. Penulis menempuh pendidikan: SDN Onembute lulus tahun 1982, SMPN Palangga lulus tahun 1985, SMAN 4 Kendari lulus 1988. S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UNHALU lulus 1994, S2 Program Studi Manajemen Pendidikan UNM Makassar lulus 2003, S3 Program Studi Manajemen Pendidikan UNJ Jakarta lulus 2013.



Dede Supendi, Putra kelahiran Kampung Cipancar III Desa Cipancar Kec. Serangpanjang. Pendidikan Dasar hingga SMA diselesaikan di daerah kelahirannya Kabupaten Subang. Mengawali kuliahnya pada Diploma Dua (D2) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di IAIN sekarang UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di STAI DR KHEZ Muttaqien Purwakarta dan Strata Dua (S2) Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini sedang menyelesaikan studi di Program Doktor (S3) Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

Karirnya selama 15 tahun menjadi Guru. Dimulai Guru Honorer, Guru Bantu Daerah Terpencil (GBDT), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru, PNS Guru hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 mutasi menjadi Staf Pelaksana Sub Bagian (SubBag) Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Purwakarta. Pada september 2016 mendapat amanah promosi menjadi Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, saat ini aktivitasnya sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta. Penulis juga mengabdikan sebagai Dosen di STAI DR KH EZ Muttaqien Purwakarta sejak 2010 dan saat ini dipercaya

menjadi Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni. Tercatat 25 Judul artikel populer telah dipublikasi media cetak seperti Forum Guru HU. Pikiran Rakyat, HU. Pasundan Ekspres, HU. Radar Karawang dan media lainnya. Aktif sebagai narasumber berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, dan lokakarya serta 43 judul artikel ilmiah hasil penelitian yang telah diterbitkan diberbagai jurnal.

Pernah beraktualisasi diberbagai organisasi seperti Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Purwakarta, Karang Taruna Kab. Purwakarta, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kab. Purwakarta, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Dewan Pendidikan Kab. Purwakarta dan Paguyuban Pasudan Kab. Purwakarta. Aktif di Pramuka dan saat ini menjabat Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Informatika Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Purwakarta periode 2020-2025. Organisasi Profesi yang diikutinya diantaranya *Perkumpulan Profesi Manajer dan Administrator Pendidikan (PROMAPI)*, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Forum Komunikasi Dosen Indonesia (FKDI), Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia (PDPI) Kab. Purwakarta, Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kab. Purwakarta dan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Purwakarta.

Beberapa karya buku yang pernah ditulis diantaranya Penyunting Buku Kumpulan Carpon Layung Katumbiri tahun 2010, Kumpulan Puisi Matahari Cinta Samudra Kata, Antologi Puisi Riak Sajak, Antologi Puisi Riak Sajak Edisi ke 2, PPDB Berbasis Online Solusi Tingkatkan Kepuasan Pelanggan dan Mutu Layanan Sekolah. Balada Essay; 21 Opini Catatan Kecil, Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah, Komunikasi Interpersonal dalam Pendidikan, Evaluasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam dan Kurikulum Pendidikan Islam.



Saefrudin, ID Sinta 6696848 Lahir di Indramayu Propinsi Jawa barat pada tanggal, 04 Juni 1982 Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Indramayu Tahun 1994, tamat di SMP Negeri 2 Widasari Indramayu, Tahun 1997, selanjutnya menyelesaikan

SMA Negeri 1 Luwimunding Majalengka pada Tahun 2021. Kemudian melanjutkan studi pada program sarjana pendidikan Pendidikan Agama Islam STAIMA Cirebon dan selesai pada Tahun 2006. Pada Tahun 2010 menyelesaikan program magister di bidang Manajemen Pendidikan Islam di Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang Jatim dan pada Tahun 2017 menyelesaikan program Doktor di Kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis aktif dalam menulis artikel ilmiah dengan judul :

1. Kumpulan doa dan sholawat (Kitab kecil).
2. Implikasi kitab talim muta'lim terhadap akhlak santri di pesantren Kebon jambu Babakan Ciwaringin Jombang (buku).
3. Peran masyarakat terhadap pengembangan pendidikan pesantren di pesantren pesantren Tebuireng Jombang dan Pesantren Darul Ulum Jomabang (buku).
4. Kepemimpinan perguruan tinggi terhadap pengembangan profesionalisme dosen di U UNHASY dan UNIPDU Jombang (Jurnal).

5. Manajemen berbasis sekolah di pendidikan dasar dan menengah (jurnal).
6. Manajemen dan organisasi (jurnal)
7. Membangun Kesadaran pendidikan dalam prespektif islam (jurnal).
8. Pengorganisasian Dalam Manajemen S Saefrudin AL-HIKMAH 5 (5)
9. Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah Islam jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2(1),J50-60
10. Abdul Wahid Hasyim's Thoughts in Modernizing Islam Education Institutions in Indonesia EDU-RELIGIA: Jurnal Keagamaan dan Pembelajarannya 6 (1), 57-72.,
11. FASILITAS TEKNOLOGI PENDIDIKAN (FACILATING LEARNING) PADA IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH S Saefrudin, N Nurkholis EDU-KATA 9 (1), 36-44.,
12. Kepemimpinan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Profesionalisme Dosen Saefrudin DIROSAH 7 (2014), 489-500.
13. Konsep Teknologi Pendidikan pada penerpan pembelajaran Agama Islam ALIMIYAH 1 (1).
14. Building a Literature Culture in Islamic Education Units ; Concept and Strategy S Saefudin.
15. Journal of Advanced Multidisciplinary Research 2 (1), 44-52.

16. Nilai pendidikan islam menurut peresfektif KH Salahudin Wahid S Saefrudin AL-FIKRI 3 (1)
17. Studi banding dan seminar Internasioanal Thailand, Singapura dan Malaysia.
18. Kunjungan ke Universitas Umul Quro Mekah Al-Mukaromah.
19. Kunjungan Ke Universitas Islam Madinah Mekah Al-Mekah Al-Mukaromah.

Buku Kurikulum Pendidikan Islam

ORIGINALITY REPORT

30%
SIMILARITY INDEX

31%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.researchgate.net **28%**
Internet Source

2 [Submitted to Universiti Teknologi Malaysia](#) **1%**
Student Paper

3 repository.radenintan.ac.id **1%**
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On